

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



**DINAS KOPERASI DAN USAHA
KECIL MENENGAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

Jl. Danau Aji No 99 Tenggarong
Telp. (0541) 661281 Fax (0541) kode Pos 75512
Email: diskopukm@kutaikartanegara.g.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
KATA PENGANTAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah	8
2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	10
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	12
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	19
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah.....	19
2.1.6. Dukungan BUMD dalam pemberian pelayanan	21
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	22
2.2.1. Permasalahan Layanan perangkat Daerah.....	22
2.2.2. Isu Strategis	23
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029	22
3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029.....	23
3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	25
3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.....	27
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Uraian Program.....	29
4.2. Uraian Kegiatan	31
4.3. Uraian Sub Kegiatan	34

4.4. Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	44
4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	62
4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah.....	62
BAB V PENUTUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2 .1 Struktur Organisasi	10
Gambar 2 2 Perkembangan Koperasi	13
Gambar 2 3 Koperasi Sehat dan Cukup Sehat.....	15
Gambar 2 4 Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha	17
Gambar 2. 5 Pertumbuhan Wirausaha Baru	18
Gambar 2. 6 Perkembangan Nilai SAKIP Dinas Koperasi & UKM	19
Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD.....	23
Gambar 3. 2 Keraangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD	24
Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD.....	28

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	11
Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana	12
Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM.....	15
Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024.....	16
Tabel 2. 5 Perumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan UKM.....	23
Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM	21
Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMK.....	24
Tabel 3. 2 Penahapan Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UMK.....	26
Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra	27
Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara	31
Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan	44

KATA PENGANTAR



Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat diselesaikan dengan baik.

Dokumen ini disusun untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dinas dalam lima tahun mendatang. Melalui analisis yang komprehensif, dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman dalam mengoptimalkan peran dan kontribusinya sebagai fasilitator produktifitas lembaga koperasi dan usaha kecil menengah di kabupaten kutai Kartanegara.

Penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang perencanaan serta pengelolaan organisasi pemerintahan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses penyusunan dokumen ini, termasuk tim penyusun dan para pemangku kepentingan terkait.

Akhir kata, semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi pelaksanaan tugas Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara untuk mendukung keberhasilan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Kutai Kartanegara, 23 Desember 2025

Plt. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, representing the name H. Thaufiq Zulfian Noor.

H. THAUFIQ ZULFIAN NOOR, S.Pi.,M.A.P

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 pada tanggal 23 Juni 2025 menjadi awal penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program prioritas kepala daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Perangkat Daerah mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 dilaksanakan secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029. Hal ini bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan daerah. Secara normatif, penyusunan Renstra Perangkat Daerah diamanatkan oleh Pasal 272 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyebutkan bahwa Kepala Perangkat Daerah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang menjadi pedoman bagi perangkat daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan. Penyusunan renstra sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah. Dokumen ini berfungsi sebagai instrumen penting untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Penyusunan Renstra ini juga secara spesifik mengadopsi agenda Asta Cita pemerintah pusat, khususnya dalam mendukung Prioritas Nasional melalui pengembangan Koperasi Desa Merah Putih. Program ini diintegrasikan sebagai langkah strategis untuk memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi kerakyatan di tingkat desa, yang selaras dengan upaya transformasi ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara dari sektor ekstraktif menuju sektor produktif berbasis kerakyatan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Penyusunan ini tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung secara simultan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025–2029, serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025–2029, sekaligus memperhatikan kebijakan sektoral terkait pengembangan koperasi dan UMKM. Dengan demikian, Renstra ini berfungsi sebagai peta jalan yang memastikan keselarasan antara program daerah dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah.

Tahapan penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan melalui proses yang partisipatif dan terkoordinasi, dimulai dari persiapan, penyusunan rancangan awal, dilanjutkan penyusunan rancangan, pelaksanaan forum perangkat daerah, penyusunan rancangan akhir, dan penetapan. Renstra ini ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah paling lambat satu bulan setelah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Renstra Perangkat Daerah juga menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD. Dengan demikian, Renstra PD menjamin kesinambungan antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan, sehingga arah pembangunan sektor koperasi dan UMKM dapat berjalan terarah, konsisten, dan terukur.

Secara normatif, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah bertugas melaksanakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro kecil, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah. Peran ini sangat strategis karena koperasi dan Usaha Kecil Menengah terbukti menjadi tulang punggung perekonomian, berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja, peningkatan daya saing daerah, serta pengurangan tingkat kemiskinan.

Dengan peran yang besar, pengelolaan koperasi dan Usaha Kecil Menengah perlu dilakukan secara inklusif untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan layanan publik di bidang koperasi dan usaha kecil

menengah dapat diakses secara adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Kebijakan ini sejalan dengan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang menekankan penguatan ekonomi sektor unggulan serta transformasi menuju ekonomi rendah karbon dan berkelanjutan, sehingga partisipasi masyarakat termasuk perempuan dan kelompok rentan untuk mengembangkan koperasi dan usaha kecil menengah tidak hanya meningkatkan kesejahteraan keluarga, tetapi juga memperkuat struktur ekonomi daerah secara inklusif dan berkesinambungan.

Secara faktual, sektor koperasi dan usaha kecil menengah di Kabupaten Kutai Kartanegara masih menghadapi sejumlah tantangan, diantaranya:

1. Belum optimalnya kompetensi sumber daya manusia pengelola koperasi;
2. Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro, khususnya dalam hal kualitas, pembiayaan, dan akses pasar;
3. Terbatasnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan usaha dan pemasaran;
4. Rendahnya proporsi usaha mikro yang berhasil naik kelas menjadi usaha kecil atau menengah;
5. Masih terbatasnya akses perempuan dan kelompok rentan dalam pengembangan usaha mikro dan wirausaha baru.

Meskipun demikian, sektor koperasi dan usaha kecil menengah memiliki potensi besar untuk dikembangkan dalam mendukung transformasi ekonomi Kutai Kartanegara menuju ekonomi non-ekstraktif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, Renstra ini menjadi instrumen strategis dalam memastikan strategi, arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan sektor koperasi dan usaha kecil menengah berjalan secara sistematis, adaptif, dan terukur. Melalui perencanaan ini, diharapkan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dapat berkontribusi nyata dalam perwujudan pembangunan ekonomi daerah yang berkeadilan, inklusif, dan berkelanjutan.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 berpedoman pada berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang

menjadi dasar hukum dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025–2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 59).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023–2042 (Lembaran daerah kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2023 nomor 163);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 No. 180);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025); dan
17. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 Nomor 46).

Dasar hukum tersebut menjadi landasan dalam merumuskan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2025–2029 agar selaras dengan kerangka pembangunan nasional, provinsi, maupun daerah, serta menjamin sinkronisasi vertikal dan horizontal dalam sistem perencanaan pembangunan daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan maksud untuk memberikan arahan kebijakan pembangunan jangka menengah di bidang koperasi dan usaha kecil menengah bagi para pemangku kepentingan, yang disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029. Melalui dokumen ini, pembangunan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah diharapkan dapat berjalan secara efisien, efektif, terarah, dan berkelanjutan, serta didasarkan pada prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), inovatif, dan berorientasi hasil (*result-based management*) guna memperkuat daya saing ekonomi daerah berbasis sektor produktif rakyat.

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah:

1. Mengidentifikasi capaian kinerja pembangunan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah pada periode perencanaan sebelumnya;
2. Merumuskan permasalahan dan isu strategis di bidang pengembangan koperasi dan pemberdayaan UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Menetapkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang koperasi dan Usaha Kecil Menengah untuk periode lima tahun ke depan;
4. Menetapkan strategi dan arah kebijakan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan sektor koperasi dan UKM;
5. Menyediakan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang disertai indikator kinerja, target, dan pagu indikatif sebagai dasar pelaksanaan pembangunan daerah;
6. Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sebagai ukuran keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan UKM;

7. Menyusun pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah setiap tahunnya; dan
8. Menjadi tolak ukur dan bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan pembangunan di bidang koperasi dan UKM secara terukur, transparan, dan akuntabel.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- 1) Bab I Pendahuluan: memuat latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.
- 2) Bab II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah: menguraikan tugas, fungsi, struktur, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra, serta permasalahan dan isu strategis.
- 3) Bab III Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan: berisi tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Renstra PD 2025–2029.
- 4) Bab IV Program, Kegiatan, Subkegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan: memuat program, kegiatan, subkegiatan, indikator kinerja, target, serta keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Selain itu, disajikan juga indikator kinerja utama dan indikator kinerja kunci untuk pengukuran kinerja dinas.
- 5) Bab V Penutup: berisi kesimpulan, kaidah pelaksanaan, serta mekanisme pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renstra.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat daerah

2.1.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, perangkat daerah ini melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang koperasi dan UKM. Kepala Dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah menyelenggarakan beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Perumusan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- 2) Pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas di bidang koperasi dan usaha kecil menengah; dan
- 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama dinas adalah merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, penyusunan program, pengawasan, monitoring, evaluasi, serta pelaporan di bidang koperasi dan usaha kecil menengah. Struktur organisasi terdiri atas:

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas memiliki tugas mengkoordinasikan perumusan alternatif kebijakan Daerah berbasis data dan informasi, serta melaksanakan urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar di bidang Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi kewenangan Daerah.

2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, terdiri dari:

- a. Sub bagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian.

Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Umum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Mempunyai tugas menghimpun dan mengumpulkan data, serta merencanakan, melaksanakan, memonitoring, dan mengevaluasi urusan umum, ketatalaksanaan dan kepegawaian

b. Sub bagian Penyusunan Keuangan dan Aset

Subbagian Keuangan dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian Keuangan dan Aset yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Tugas utamanya meliputi penghimpunan dan pengumpulan data, perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan keuangan dan aset.

3) Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Bidang ini bertugas mengolah data menjadi informasi yang relevan, serta mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia koperasi, pengawasan, dan pemeriksaan koperasi.

4) Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, yang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang ini bertugas mengolah data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memonitor, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi, pengembangan, dan perlindungan koperasi.

5) Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas. Kepala Bidang ini bertugas menyajikan data menjadi informasi, serta mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan urusan kewirausahaan, fasilitasi usaha mikro, serta pengembangan dan perlindungan usaha mikro.

6) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

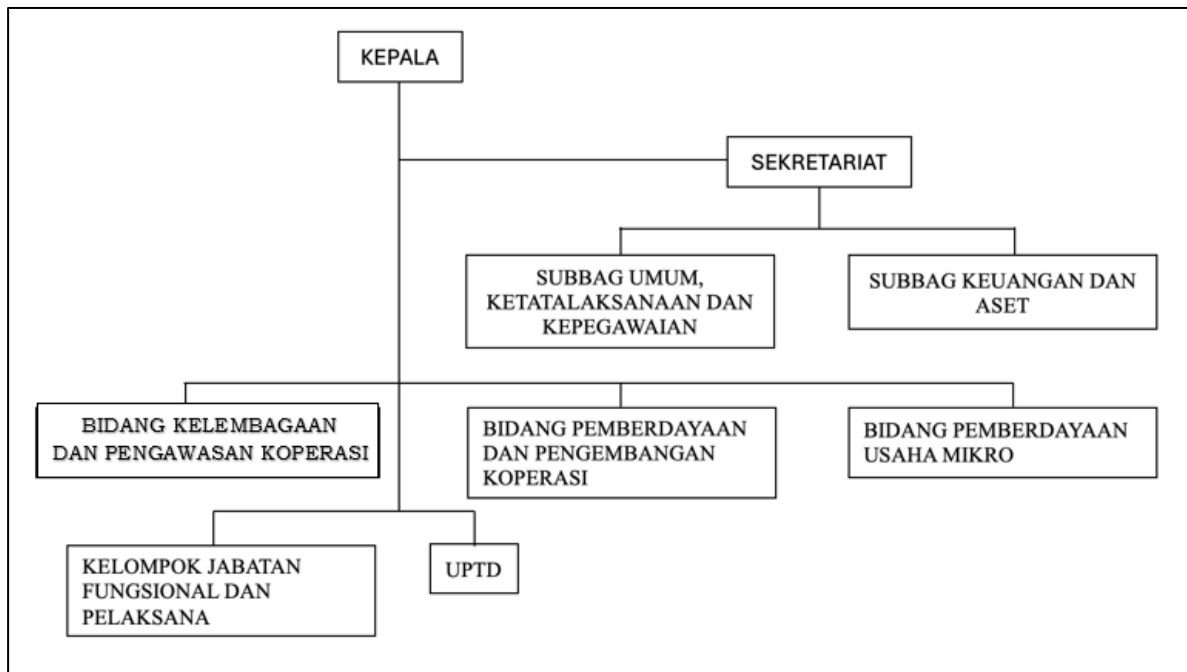
UPTD yang dipimpin oleh Kepala UPTD memiliki ketentuan mengenai pembentukan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, serta tata kerjanya yang diatur melalui Peraturan Bupati pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana terdiri dari jabatan-jabatan yang dikelompokkan berdasarkan keahlian, keterampilan, serta tugasnya. Jabatan Fungsional berfokus pada keahlian dan keterampilan tertentu, sedangkan Jabatan Pelaksana bertugas melaksanakan pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan. Tugas dan fungsi masing-masing jenis jabatan tersebut diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Struktur ini memungkinkan pelaksanaan fungsi kelembagaan, pelayanan administrasi, pengawasan koperasi, hingga pemberdayaan UKM.

Gambar 2 .1 Struktur Organisasi



Sumber: Lampiran Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 46 Tahun 2023

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah terdiri dari total 90 orang, dengan komposisi 42 orang laki-laki dan 48 orang perempuan. Dari jumlah tersebut, 68 orang berstatus ASN, sementara 22 orang lainnya berstatus PPPK. Secara lebih rinci, pegawai ASN pada Dinas

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didominasi oleh pegawai berstatus PNS, diikuti oleh pegawai PPPK. Komposisi pegawai berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Komposisi SDM Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

NO	ASN	Jenis Kelamin	
		Laki-Laki	Perempuan
	Berdasarkan Status Kepegawaian		
1	PNS	24	31
2	PPPK	16	12
	Berdasarkan Golongan		
	IV/b	1	0
	IV/a	2	2
	III/d	3	10
	III/c	1	2
	III/b	0	1
	III/a	5	3
	II/d	12	12
	II/b	-	1
	Berdasarkan Eselon		
	Eselon III	3	0
	Eselon IV	0	1
	Berdasarkan Tingkat Pendidikan		
	Magister (S2)	2	4
	Sarjana (S1)	19	22
	Diploma (D3)	1	0
	Diploma (D1)	0	1
	SMA/SMK	17	15
	SMP	0	1
	SD	1	0
Jumlah		40	43
		83	

Sumber: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kukar

b. Sarana dan Prasarana

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah didukung oleh aset berupa tanah, gedung kantor, gudang, jaringan distribusi, kendaraan dinas, peralatan kantor, hingga perangkat teknologi informasi. Sebagian besar aset dalam kondisi baik, meski terdapat beberapa peralatan (seperti generator dan kendaraan) dengan kondisi rusak ringan hingga berat. Hal ini menunjukkan perlunya program peremajaan sarana prasarana untuk mendukung kualitas pelayanan.

Tabel 2. 2 Sarana dan Prasarana

No	Jenis Sarana/Prasarana	Jumlah	Nilai (Rp)	Kondisi	Keterangan
1	Tanah untuk bangunan kantor	1 bidang	780.000.000	Baik	Digunakan untuk kantor dinas
2	Gedung kantor permanen	3 unit	5.772.333.100	Baik	Termasuk kantor utama dan gedung tambahan
3	Gudang	3 unit	695.194.915	Baik	Gudang penyimpanan operasional
4	Bangunan terbuka (lantai jemur)	1 unit	204.241.020	Baik	Fasilitas penunjang
5	Jaringan distribusi	3 unit	230.659.500	Baik	Listrik dan jaringan distribusi
6	Kendaraan dinas roda 4	5 unit	1.329.810.000	4 baik, 1 rusak ringan	Kendaraan operasional
7	Kendaraan roda 2	20 unit	332.128.000	Baik	Operasional lapangan
8	Peralatan kantor (lemari, meja, kursi, filing cabinet, dll.)	±300 unit	1.021.000.000	Sebagian besar baik	Mendukung administrasi
9	Peralatan elektronik (komputer, laptop, printer, scanner, projector, CCTV, dll.)	±260 unit	2.900.000.000	Baik	Mendukung pelayanan digital
10	Peralatan studio, komunikasi, dan sound system	±70 unit	830.000.000	Baik	Digunakan untuk kegiatan penyuluhan/sosialisasi
11	Sarana rumah tangga (AC, kulkas, meja rapat, sofa, dll.)	±250 unit	850.000.000	Baik	Fasilitas kantor
12	Sarana khusus (water treatment, UPS, genset, dll.)	±10 unit	548.020.000	Sebagian baik, 1 genset rusak berat	Penunjang operasional

Sumber: Subbagian Umum, Ketatalaksanaan, dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan UMK Kukar

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

a. Capaian Indikator Kinerja

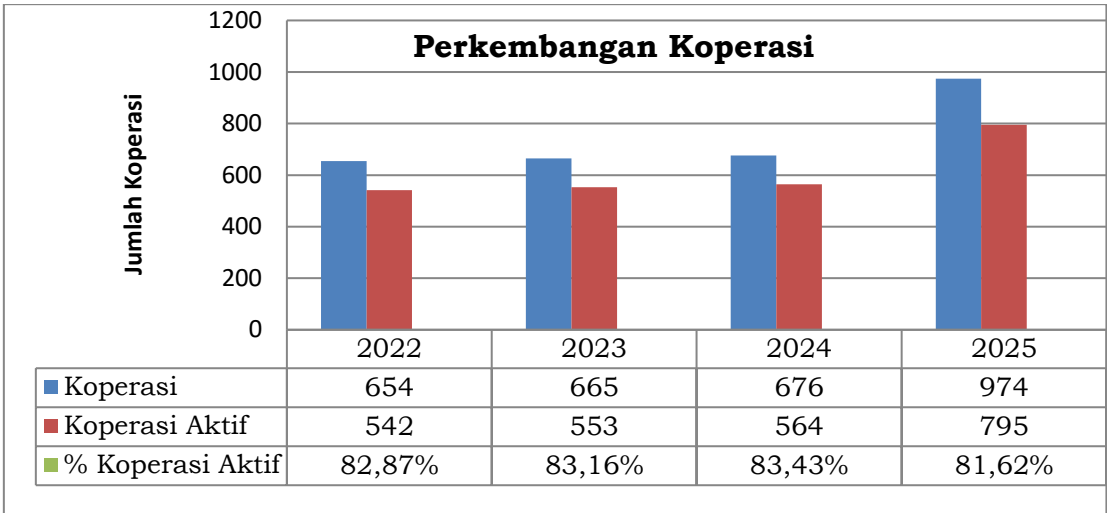
Selama 2020–2024, indikator kinerja menunjukkan tren peningkatan, antara lain:

1) Koperasi aktif

Perkembangan koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2020–2025 menunjukkan dinamika yang cukup signifikan, baik dari sisi jumlah koperasi maupun tingkat keaktifannya. Secara umum, jumlah koperasi cenderung meningkat setiap tahun, diikuti dengan tren pertumbuhan persentase koperasi aktif yang relatif stabil hingga tahun

2024. Pada tahun 2020, terdapat 626 koperasi, dengan 514 koperasi aktif atau 82,11% dari total koperasi. Pada tahun 2021, jumlah koperasi meningkat menjadi 640 unit, dan koperasi aktif mencapai 528 unit dengan persentase keaktifan 82,50%. Tren peningkatan ini berlanjut pada tahun 2022 dan 2023 dengan persentase koperasi aktif masing-masing sebesar 82,87% dan 83,16%, menunjukkan adanya stabilitas kelembagaan serta pembinaan yang berkesinambungan.

Gambar 2 2 Perkembangan Koperasi



Sumber: Data Keragaan Diskopukm (Ket: *data bulan Juli 2025)

Berdasarkan Gambar 2.2, perkembangan jumlah koperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara selama periode 2022 hingga Juli 2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dan signifikan. Pada rentang tahun 2022 hingga 2024, pertumbuhan koperasi berjalan secara stabil dengan rata-rata peningkatan jumlah koperasi aktif sebesar 2% per tahun. Namun, memasuki medio tahun 2025, terjadi lonjakan kuantitas yang sangat tajam, di mana jumlah koperasi meningkat dari 676 unit di tahun 2024 menjadi 974unit pada Juli 2025. Kenaikan drastis ini merupakan implikasi nyata dari percepatan program pembangunan ekonomi kerakyatan melalui Program Dedikasi Kukar Idaman, khususnya dalam pembentukan koperasi sektor pertanian, serta adanya penyelarasan dengan agenda Prioritas Nasional melalui inisiasi Koperasi Desa Merah Putih.

Meskipun secara kuantitas jumlah koperasi aktif meningkat menjadi 795 unit pada tahun 2025, tantangan besar muncul pada rasio keaktifan yang berada di angka 81,62%. Hal ini mengindikasikan bahwa

pertumbuhan jumlah lembaga koperasi yang masif perlu dibarengi dengan penguatan kualitas manajemen dan tata kelola organisasi. Sejalan dengan analisis faktor penghambat yang ditemukan, rendahnya kompetensi SDM dalam pemanfaatan teknologi informasi serta keterbatasan tenaga pendamping lapangan menjadi perhatian utama. Oleh karena itu, fokus Dinas Koperasi dan UKM dalam periode Renstra 2025-2029 adalah mengoptimalkan fungsi pembinaan agar koperasi-koperasi baru tersebut dapat bertransformasi menjadi koperasi yang sehat, mandiri, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Kutai Kartanegara."

Angka keaktifan sebesar 81,62% yang tercatat pada pertengahan tahun 2025 ini bukan mengindikasikan penurunan kinerja kelembagaan, melainkan merupakan dampak positif dari proses perbaikan, validasi, dan pemutakhiran data base secara menyeluruh agar lebih akurat dan faktual. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor teknis, antara lain:

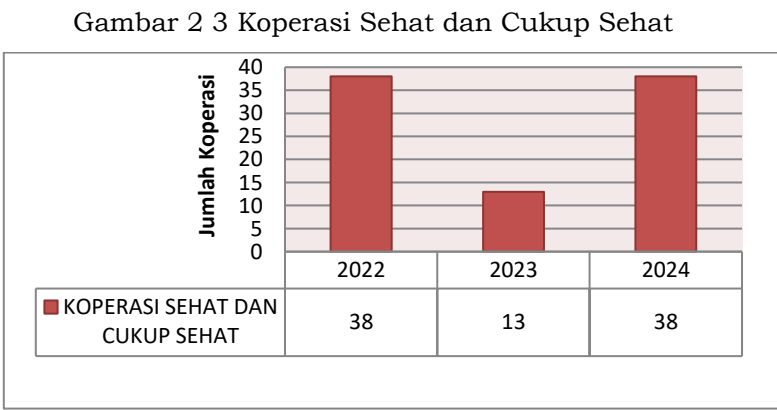
- 1) Proses Pemutakhiran Data: Saat ini tengah berlangsung rekonsiliasi data secara intensif, termasuk pembersihan data antara koperasi bentukan baru dengan koperasi lama yang sudah tidak aktif agar didapatkan basis data yang valid.
- 2) Siklus Pelaksanaan RAT: Sebagian besar koperasi, terutama koperasi yang baru terbentuk, masih dalam tahap persiapan administrasi sehingga per Juli 2025 baru tercatat sebanyak 83 koperasi yang melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT). Angka ini dipastikan akan meningkat tajam pada akhir tahun buku.
- 3) Verifikasi Sertifikat NIK: Proses verifikasi dan penerbitan Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) masih terus berjalan secara administratif, di mana hingga pertengahan tahun sistem sedang memvalidasi dokumen bagi ratusan entitas koperasi baru.

Dengan mempertimbangkan pola tahunan sebelumnya, persentase koperasi aktif pada akhir 2025 diperkirakan akan meningkat signifikan seiring selesainya proses verifikasi data, pelaksanaan RAT, dan penyempurnaan sistem pelaporan oleh masing-masing koperasi. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mendorong revitalisasi

kelembagaan melalui kepatuhan RAT dan pemutakhiran NIK. Lonjakan jumlah koperasi yang sangat tinggi pada tahun 2025 menunjukkan minat masyarakat yang luar biasa terhadap ekonomi kerakyatan, yang jika dikelola dengan baik, akan menjadi kekuatan utama dalam memperkuat struktur ekonomi daerah.

2) Koperasi Sehat dan Cukup Sehat

Indikator Koperasi Sehat dan Cukup Sehat merupakan indikator yang relatif baru dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2022. Sejak penerapannya, jumlah koperasi yang berhasil dinilai menunjukkan dinamika yang dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan koperasi, kelengkapan dokumen, serta kapasitas pengawasan.



Sumber: Diskopukm, 2025

Pada tahun 2022, terdapat 38 koperasi yang berhasil masuk kategori Sehat dan Cukup Sehat. Ini menjadi tahun pertama penerapan indikator, sehingga proses penilaian dilakukan secara bertahap sesuai kesiapan koperasi dalam memenuhi syarat penilaian. Namun pada tahun 2023, jumlah koperasi yang memenuhi kategori tersebut menurun menjadi 13 koperasi. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh berkurangnya jumlah koperasi yang melaksanakan RAT tepat waktu serta masih rendahnya kualitas laporan keuangan yang disampaikan.

Pada tahun 2024, jumlah koperasi yang masuk kategori Sehat dan Cukup Sehat kembali meningkat menjadi 38 koperasi. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam kesadaran kelembagaan koperasi terhadap pentingnya RAT, serta peningkatan dukungan pembinaan yang mendorong lebih banyak koperasi memenuhi standar kelengkapan dokumen. Sementara untuk tahun 2025, proses penilaian masih berlangsung sehingga hasil final belum dapat disampaikan. Secara prinsip,

penilaian kesehatan koperasi hanya dapat dilakukan terhadap koperasi yang telah melaksanakan RAT serta menyertakan laporan keuangan tahunan sebagai dokumen wajib. Persyaratan ini penting untuk memastikan bahwa hasil penilaian benar-benar mencerminkan kondisi faktual koperasi, baik dari aspek manajemen, keuangan, maupun kepatuhan administratif.

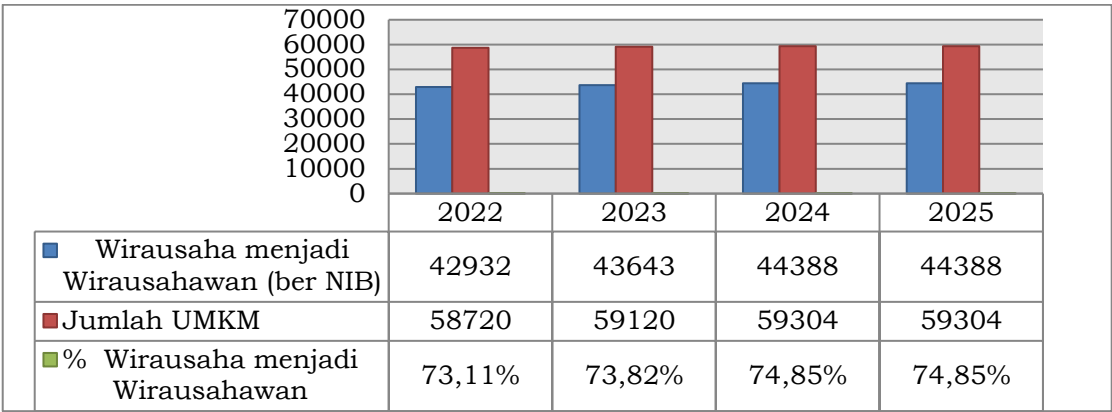
Namun, pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi menghadapi sejumlah tantangan besar, salah satunya adalah keterbatasan SDM tenaga fungsional Pengawas Koperasi. Jumlah pengawas yang tidak sebanding dengan jumlah koperasi aktif yang harus dipantau mengakibatkan proses pengawasan tidak dapat dilakukan secara intensif dan berkala. Kondisi ini semakin diperberat oleh persebaran koperasi yang berada di wilayah-wilayah terpencil. Keterbatasan SDM juga menyebabkan penilaian kadang hanya mengandalkan dokumen administrasi tertulis tanpa verifikasi lapangan yang komprehensif. Hal ini berpotensi mengaburkan kondisi riil koperasi, sehingga berbagai persoalan internal—seperti lemahnya manajemen, piutang macet, atau tidak efektifnya kegiatan usaha—yang seharusnya terdeteksi lebih awal menjadi sulit diidentifikasi.

Dengan demikian, capaian jumlah Koperasi Sehat dan Cukup Sehat tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja koperasi itu sendiri, tetapi juga oleh kemampuan sistem pengawasan dalam memberikan penilaian yang akurat dan mendalam. Ke depan, penguatan kapasitas SDM pengawas, peningkatan kualitas RAT, serta perbaikan laporan keuangan menjadi faktor kunci untuk memastikan penilaian kesehatan koperasi semakin valid, menyeluruh, dan bermanfaat bagi pembinaan koperasi.

3) Persentase Usaha Mikro yang menjadi Wirausaha

Perkembangan transformasi pelaku usaha mikro menjadi wirausaha formal di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan akselerasi yang signifikan sejak tahun 2022. Berdasarkan hasil penguatan basis data melalui sistem *Online Single Submission* (OSS), pada tahun 2022 persentase wirausaha yang telah memiliki legalitas Nomor Induk Berusaha (NIB) mencapai 73,11%. Capaian ini merupakan titik balik penting yang dihasilkan dari masifnya pendampingan perizinan jemput bola dan sosialisasi berkelanjutan kepada pelaku usaha di tingkat kecamatan

Gambar 2 4 Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha



Sumber: Diskopukm, 2025

Tren positif ini terus terjaga pada tahun 2023 dengan peningkatan proporsi wirausaha ber-NIB menjadi 73,82%, dan mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 74,85%. Secara administratif, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 44.388 wirausaha/UMKM telah memiliki legalitas formal dari total populasi 59.034 UMKM yang terdata. Tingginya angka legalitas ini menjadi fondasi utama bagi pelaku usaha untuk mengakses berbagai instrumen penguatan ekonomi, seperti fasilitasi permodalan melalui perbankan maupun program bantuan pemerintah lainnya."

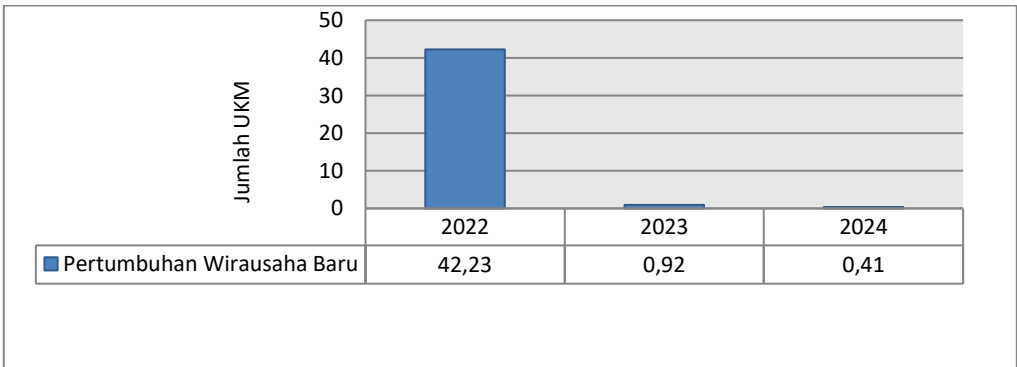
Adapun pada tahun 2025, Dinas Koperasi dan UKM berfokus pada validasi dan sinkronisasi data seiring dengan implementasi Program Dedikasi Kukar Idaman melalui pembangunan Klinik UMKM di setiap Kecamatan. Kehadiran Klinik UMKM ini diproyeksikan akan semakin mempermudah pelaku usaha dalam memproses legalitas dan standarisasi produk secara mandiri. Meskipun proses verifikasi masih berjalan, tahun 2025 diprediksi akan menunjukkan konsistensi pertumbuhan seiring dengan target UMKM Naik Kelas dan peningkatan kontribusi sektor UMKM terhadap PDRB daerah. Upaya integrasi data menuju 'Satu Data UMKM' ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai profil wirausaha yang lebih berkualitas, berdaya saing, dan siap menembus pasar digital (*e-commerce*).

4) Wirausaha baru

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan sektor kewirausahaan di Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan keberhasilan dalam mempertahankan stabilitas koperasi aktif, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pertumbuhan akumulatif jumlah UMKM yang signifikan. Namun, fluktuasi pada indikator Wirausaha Baru dan UMKM

Naik Kelas mengindikasikan perlunya kebijakan yang lebih konsisten dan berkelanjutan dalam hal pemberdayaan.

Gambar 2. 5 Pertumbuhan Wirausaha Baru



Sumber: Diskopukm, 2025

Berdasarkan data pada Gambar 2.6, terlihat dinamika pertumbuhan yang sangat kontras dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, pertumbuhan wirausaha baru melonjak tajam hingga 42,23%. Lonjakan ini merupakan implikasi dari pemulihan ekonomi pasca pandemi serta masifnya implementasi sistem perizinan *Online Single Submission* (OSS) yang mendorong legalitas usaha secara besar-besaran di tingkat masyarakat.

Namun, pasca-fase lonjakan tersebut, pertumbuhan wirausaha baru mengalami normalisasi yang signifikan, tercatat sebesar 0,92% pada tahun 2023 dan 0,41% pada tahun 2024. Pertumbuhan yang berada di bawah angka 1% per tahun ini mengindikasikan bahwa sektor kewirausahaan daerah sedang memasuki fase konsolidasi. Pada tahap ini, fokus pembangunan bergeser dari sekadar penambahan kuantitas (jumlah pelaku usaha) menuju penguatan kualitas dan validasi basis data pelaku usaha yang lebih akurat.

Rendahnya angka pertumbuhan dalam dua tahun terakhir juga mencerminkan tantangan nyata pada kapasitas manajerial kewirausahaan serta keterbatasan akses pasar yang lebih luas bagi pelaku usaha mikro. Kondisi faktual ini menjadi landasan strategis bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk mengoptimalisasi Program Dedikasi Kukar Idaman Terbaik, khususnya melalui penguatan peran Klinik UMKM di setiap kecamatan.

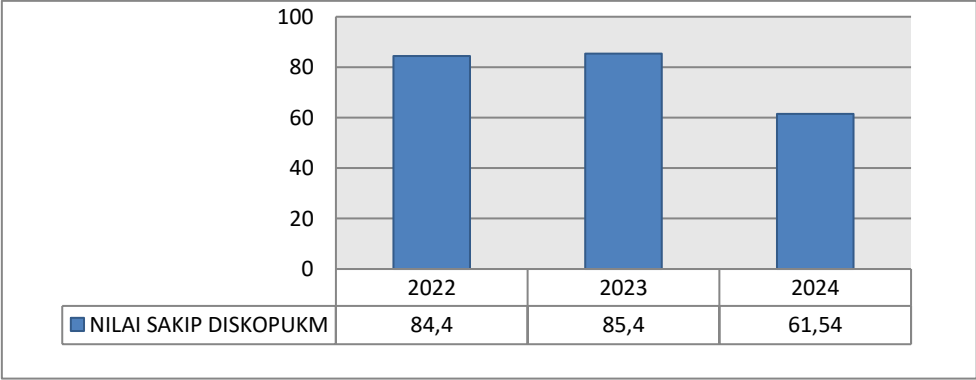
Melalui intervensi Klinik UMKM, diharapkan tercipta stimulus baru yang mampu mendorong lahirnya wirausaha baru yang inovatif, sekaligus memberikan pendampingan intensif bagi UMKM eksisting agar dapat Naik Kelas secara kualitas. Upaya ini menjadi krusial untuk meningkatkan

kontribusi sektor ekonomi kerakyatan terhadap PDRB daerah, selaras dengan target pencapaian transformasi ekonomi dalam RPJMD 2025-2029.

5) Nilai SAKIP

Perkembangan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Koperasi dan UKM menunjukkan dinamika yang mencerminkan proses transisi menuju tata kelola pemerintahan yang lebih berkualitas. Pada tahun 2022, nilai SAKIP mencapai angka tertinggi sebesar 84,40 poin, yang kemudian berhasil dipertahankan dan ditingkatkan secara tipis pada tahun 2023 menjadi 85,40 poin. Capaian ini menandai keberhasilan instansi dalam memenuhi standar manajemen kinerja pada periode tersebut.

Gambar 2. 6 Perkembangan Nilai SAKIP Dinas Koperasi & UKM



Sumber Data : LHE Penilaian Inspektorat Kabupaten

Namun, pada tahun 2024, tercatat perolehan nilai sebesar 61,54 poin. Perubahan angka ini secara substansial tidak mengindikasikan penurunan kinerja nyata di lapangan, melainkan akibat diterapkannya metodologi evaluasi yang baru oleh pihak Inspektorat. Fokus penilaian di tahun 2024 telah bergeser dari sekadar pemenuhan kelengkapan dokumen administratif menjadi penilaian berbasis substansi yang menekankan pada efektivitas program, kualitas manajemen kinerja, serta bukti konkret dampak (outcome) bagi masyarakat. Penyesuaian standar penilaian yang lebih ketat ini memaksa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menyelaraskan perencanaan dengan hasil nyata di sektor koperasi dan UMKM secara lebih presisi."

Dengan ditetapkan status baseline 2024 tersebut, Dinas Koperasi dan UKM berkomitmen menjadikan periode 2025-2029 sebagai fase penguatan akuntabilitas. Sejalan dengan target dalam Tabel Tujuan Renstra, instansi menargetkan peningkatan predikat SAKIP secara

bertahap. Hal ini akan dicapai melalui integrasi program yang lebih kuat seperti sinkronisasi data NIB dan pengembangan Koperasi Merah Putih guna memastikan bahwa setiap anggaran yang dikeluarkan memberikan manfaat yang terukur bagi kesejahteraan pelaku usaha di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan UKM selama periode 2022 sampai dengan 2024 disajikan pada tabel di bawah. Data pada tabel tersebut merupakan hasil evaluasi Renja setiap tahun.

Tabel 2. 3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan UKM

NO	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Tingkat Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
I	Indikator Tujuan:															
1	Persentase Koperasi yang meningkat Kualitasnya	50,63%	50,79%	50,94%	0,99%	1,00%	50,37%	50,63%	51,82%	n.a	n.a	99,5%	99,68%	101,73%	n.a	n.a
2	Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha	70,43%	71,22%	71,91%	72,50%	73,00%	84,40%	85,40%	61,54%	n.a	n.a	119,8%	85,40%	85,58%	n.a	n.a
3	Wirausaha /menjadi Wirausaha	11,54%	12,24%	12,59%	13,00%	13,50%	11,54%	12,24%	12,59%	n.a	n.a	100,0%	100,00%	100,00%	n.a	n.a
II	Indikator Sasaran:									n.a	n.a				n.a	n.a
1	Persentase Koperasi Aktif	82,00%	82,00%	82,00%	83,00%	84,00%	82,87%	83,16%	83,43%	n.a	n.a	101,1%	101,41%	101,74%	n.a	n.a
2	Pertumbuhan Wirausaha Baru	0,35%	0,44%	0,46%	0,50%	0,55%	0,35%	0,44%	0,46%	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a
III	Indikator Program:															
1	Persentase Kepatuhan Koperasi Yang melaksanakan RAT	15,56%	19,46%	21,40%	23,35%	27,24%	21,78%	19,59%	25,32%	n.a	n.a	140%	101%	118%	n.a	n.a
2	Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat dan Cukup Sehat	3,70%	7,41%	11,11%	14,81%	18,52%	5,81%	6,11%	7,09%	n.a	n.a	157%	82,4%	63,84%	n.a	n.a
3	Persentase Pengurus dan Pengawas Yang Memiliki Sertifikat Pelatihan Koperasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a
4	Persentase Meningkatnya Omset dan Aset Koperasi	0,97%	1,95%	2,92%	3,89%	4,86%	2,29%	3,43%	7,40%	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a
5	Persentase UMKM Yang Telah Difasilitasi	1,81%	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	1,81%	1,81%	1,81%	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a
6	Pertumbuhan Omzet UMKM	0,3%	0,6%	0,9%	1,1%	1,4%	0,28%	0,57%	0,85%	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	68,00	70,00	73,00	77,00	80,00	84,40	85,40	61,54	n.a	n.a	124,1%	122,00%	84,30%	n.a	n.a
III	Indikator Kegiatan:															
1	Persentase pemeriksaan dan pengawasan koperasi	43,93%	67,8%	75,88%	75,88%	83,87%	42,50%	65,40%	73,20%	n.a	n.a	96,7%	96,5%	96,5%	n.a	n.a
2	Jumlah Penilaian dan Penghargaan Kesehatan KSP/USP	53	150	160	170	180	53	145	155	n.a	n.a	100%	96,7%	96,9%	n.a	n.a

NO	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian tahun ke-					Tingkat Capaian pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
3	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan pelatihan perkoperasian	45	90	90	90	90	45	88	90	n.a	n.a	100%	97,8%	100%	n.a	n.a
4	Jumlah pemberdayaan dan perlindungan koperasi	25	40	50	55	60	25	38	48	n.a	n.a	100%	95,0%	96,0%	n.a	n.a
5	Jumlah UMKM yang di berdayakan	1.020	1.121	1.121	1.121	1.121	1.020	1.100	1.121	n.a	n.a	100%	98,1%	100%	n.a	n.a
6	Jumlah Pengembangan Usaha Mikro	420	320	320	320	320	420	315	320	n.a	n.a	100%	98,4%	100%	n.a	n.a
7	Jumlah Dokumen Rencana, Anggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4	4	4	4	4	4	4	4	n.a	n.a	100%	100%	100%	n.a	n.a

Sumber: hasil evaluasi Renja

Tabel 2.3 menyajikan pencapaian indikator kinerja tujuan, sasaran, dan program Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan tren yang sangat positif dan akuntabel, di mana mayoritas indikator berhasil memenuhi bahkan melampaui target Renstra yang telah ditetapkan.

Pada indikator tujuan, Persentase Koperasi yang Meningkatkan Kualitasnya menunjukkan konsistensi yang stabil. Jika pada tahun 2022 dan 2023 capaian berada di angka 99,50% dan 99,68%, maka pada tahun 2024 kinerja berhasil melampaui target dengan tingkat capaian sebesar 101,73%. Hal ini membuktikan bahwa upaya pembinaan, pengawasan, dan peningkatan kapasitas kelembagaan telah memberikan dampak nyata. Sejalan dengan hal tersebut, Persentase Koperasi Aktif sebagai indikator sasaran juga menunjukkan performa luar biasa yang selalu melampaui target setiap tahunnya, mencapai 101,74% pada tahun 2024, yang mencerminkan efektivitas kebijakan dalam menjaga aktivitas koperasi di tengah dinamika ekonomi.

Di sektor kewirausahaan, Persentase Usaha Mikro Menjadi Wirausaha mencatat realisasi yang sangat dinamis. Pada tahun 2022, capaian melambung hingga 119,8%, sementara pada tahun 2023 dan 2024 performa tetap terjaga stabil di angka 85,40% dan 85,58%. Meskipun terdapat tantangan dalam transformasi usaha mikro, indikator Pertumbuhan Wirausaha Baru secara konsisten mencapai target 100% selama tiga tahun berturut-turut.

Kondisi ini diperkuat oleh keberhasilan program peningkatan kapasitas SDM, di mana Persentase Pengurus dan Pengawas yang Bersertifikat selalu mencapai 100%, serta adanya pertumbuhan omzet dan aset UMKM yang memenuhi target setiap tahunnya.

Pada level indikator program, Kepatuhan Koperasi dalam Melaksanakan RAT menjadi sorotan keberhasilan dengan tingkat capaian yang sangat tinggi, khususnya pada tahun 2024 yang mencapai 118%. Namun, hasil evaluasi mencatat adanya fluktuasi pada Persentase Koperasi KSP/USP Berkategori Sehat. Setelah mencapai 157% di tahun 2022, terjadi penurunan capaian menjadi 63,84% pada tahun 2024. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun secara kuantitas koperasi bertumbuh, penguatan dari sisi kesehatan finansial dan manajemen risiko memerlukan pendampingan yang lebih intensif pada periode berikutnya.

Terkait akuntabilitas organisasi, Nilai SAKIP Perangkat Daerah menunjukkan performa yang sangat tinggi pada tahun 2022 (124,10%) dan 2023 (122,00%). Terjadinya penurunan tingkat capaian menjadi 84,30% pada tahun 2024 dipahami sebagai dampak dari perubahan metodologi penilaian yang kini lebih menekankan pada substansi dampak (outcome) daripada sekadar kelengkapan administrasi. Secara keseluruhan, kinerja pelayanan periode 2022–2024 merupakan modal yang kuat bagi Dinas Koperasi dan UKM untuk melanjutkan program strategis pada periode 2025–2029, dengan fokus utama pada pemulihan kesehatan koperasi KSP/USP serta penguatan tata kelola kinerja yang berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara.

b. Capaian Anggaran

Pada periode 2022–2024, pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara menunjukkan perkembangan kinerja yang semakin terarah dan terukur. Periode ini mencerminkan tahap penguatan implementasi program serta peningkatan kualitas pengelolaan anggaran, sehingga dapat menggambarkan capaian kinerja perangkat daerah secara lebih objektif.

Pada tahun 2022, pagu anggaran Dinas Koperasi dan UKM sebesar Rp20,49 miliar dengan tingkat realisasi 72,74%. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program pada tahun tersebut masih menghadapi sejumlah kendala, terutama pada aspek kesiapan data pendukung, proses verifikasi kegiatan teknis seperti penilaian kesehatan

koperasi, serta pemenuhan persyaratan administratif. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pelaksanaan beberapa kegiatan dan mempengaruhi tingkat serapan anggaran.

Selanjutnya, pada tahun 2023, kinerja pengelolaan anggaran mengalami peningkatan yang signifikan. Pagu anggaran meningkat menjadi Rp31,97 miliar dengan realisasi mencapai 86,61%, yang merupakan capaian tertinggi dalam periode 2022–2024. Peningkatan kinerja ini didukung oleh semakin optimalnya pelaksanaan program pemberdayaan UMKM, penguatan kapasitas kelembagaan koperasi, membaiknya aktivitas ekonomi masyarakat, serta meningkatnya kualitas perencanaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

Pada tahun 2024, pagu anggaran tercatat sebesar Rp30,62 miliar dengan tingkat realisasi 83,62%. Meskipun terjadi penurunan pagu, capaian realisasi tetap berada pada kategori baik. Belum optimalnya serapan anggaran pada beberapa kegiatan dipengaruhi oleh penyesuaian kebijakan dan prioritas pembangunan daerah, keterlambatan proses pengadaan, penyempurnaan sistem pelaporan dan verifikasi data koperasi dan UMKM, serta variasi tingkat kesiapan pelaksanaan kegiatan antar bidang.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2022–2024 menunjukkan tren yang positif. Tingkat realisasi anggaran yang cenderung meningkat dan relatif stabil di atas 80% pada dua tahun terakhir mencerminkan semakin baiknya kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian program dan kegiatan. Tahun 2023 dapat dinilai sebagai periode dengan kinerja paling optimal, sementara capaian tahun 2022 menjadi dasar evaluasi untuk peningkatan efektivitas pelaksanaan program pada tahun-tahun selanjutnya dalam rangka mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2. 4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2022-2024

URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke-			Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke-			Tingkat Capaian Tahun Ke-		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota	11.967.368.048	18.022.919.148	17.321.224.077	10.512.026.097	16.127.466.333	14.509.367.294	87,84%	89,48%	83,77%
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	25.000.000	n.a	n.a	21.969.800	n.a	n.a	87,88%	0,00%	0,00%
Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	300.000.000	600.000.000	575.000.000	270.861.688	475.245.927	336.812.331	90,29%	79,21%	58,58%
Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	650.800.000	200.000.000	779.002.800	395.199.200	198.308.000	516.198.000	60,73%	99,15%	66,26%
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	75.000.000	645.000.000	320.000.000	75.000.000	419.314.060	206.310.676	100,00%	65,01%	64,47%
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	375.000.000	1.250.000.000	805.000.000	278.372.400	795.401.506	554.294.557	74,23%	63,63%	68,86%
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)	4.404.863.528	3.055.000.000	2.805.000.000	1.603.748.577	2.099.483.857	2.010.565.822	36,41%	68,72%	71,68%

Program Pengembangan UMKM	2.700.000.000	8.201.162.000	8.020.000.000	1.750.011.397	7.575.552.760	7.477.926.522	64,82%	92,37%	93,24%
TOTAL	20.498.031.576	31.974.081.148	30.625.226.877	14.907.189.159	27.690.772.443	25.611.475.202	72,72%	86,60%	83,63%

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM, 2025

2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran pelayanan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Kecil merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah. Penetapan kelompok sasaran ini menjadi dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, sehingga intervensi yang dilakukan dapat tepat sasaran dan berdampak nyata terhadap pengembangan koperasi dan UMKM.

Adapun kelompok sasaran utama pelayanan Dinas KUMK meliputi:

- 1) Koperasi yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan jumlah 514 koperasi aktif dari total 626 unit koperasi pada tahun 2024;
- 2) Pelaku usaha mikro dan kecil, yang pada tahun 2024 tercatat sebanyak 57.935 unit UMKM, sebagai sasaran utama program pemberdayaan, fasilitasi, dan penguatan kapasitas usaha;
- 3) Calon wirausaha baru, khususnya masyarakat desa dan kelompok produktif, sebagai bagian dari upaya penciptaan wirausaha dan peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat; dan
- 4) Masyarakat umum, sebagai penerima manfaat tidak langsung dari peningkatan daya saing produk koperasi dan UMKM, perluasan kesempatan kerja, serta pertumbuhan ekonomi daerah.

2.1.5. Mitra Perangkat Daerah

Dalam melaksanakan tugas pembinaan koperasi serta pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Kartanegara menjalin kemitraan strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah daerah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta. Kemitraan ini bertujuan untuk memperkuat ekosistem usaha, memperluas akses permodalan dan pemasaran, meningkatkan kapasitas pelaku UMKM, serta memastikan pelaksanaan program berjalan secara terpadu, efektif, dan berkelanjutan.

Adapun mitra strategis Dinas KUMK dalam pemberian pelayanan meliputi:

- 1) Lembaga Keuangan (bank dan lembaga pembiayaan), dalam rangka fasilitasi akses permodalan, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR),

skema pembiayaan berbunga rendah, serta pendampingan manajemen keuangan bagi UMKM.

- 2) Sektor swasta dan pasar modern, untuk perluasan akses pasar, kemitraan pemasaran produk UMKM, standardisasi produk, serta peluang masuk ke jaringan ritel modern.
- 3) Perangkat Daerah terkait, melalui kolaborasi lintas OPD guna integrasi program dan sinkronisasi pembinaan koperasi dan UMKM, antara lain:
 - a. Dinas Pariwisata, dalam pengembangan produk UMKM berbasis pariwisata, promosi, dan keikutsertaan dalam event pameran;
 - b. Dinas Pemuda dan Olahraga, dalam penguatan kewirausahaan pemuda serta pelatihan dan inkubasi bisnis;
 - c. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dalam fasilitasi sertifikasi produksi, perizinan usaha, dan akses pasar;
 - d. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dalam penyelenggaraan pelatihan vokasi dan penyiapan tenaga kerja terampil bagi UMKM;
 - e. Bagian Perekonomian Setda, dalam harmonisasi kebijakan ekonomi daerah dan koordinasi lintas sektor;
 - f. Dinas Sosial, dalam pemberdayaan keluarga miskin produktif melalui UMKM serta integrasi bantuan sosial produktif;
 - g. Dinas Pertanian dan Peternakan, dalam penyediaan bahan baku lokal, pembinaan UMKM pangan, dan pengembangan produk hasil pertanian;
 - h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam pembinaan kelembagaan koperasi serta penertiban administrasi organisasi;
 - i. Dinas Komunikasi dan Informatika, dalam fasilitasi digitalisasi UMKM, pemasaran daring, serta pengembangan sistem informasi koperasi dan UMKM;
 - j. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dalam percepatan perizinan usaha, penerbitan NIB, sertifikasi halal, dan pendampingan legalitas produk;
 - k. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dalam pengembangan UMKM desa, BUMDes, serta penguatan ekonomi lokal;
 - l. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam perencanaan, sinkronisasi program, dan penganggaran sektor koperasi dan UMKM;
 - m. Dinas Ketahanan Pangan, dalam pengembangan UMKM pangan olahan dan penguatan rantai pasok;

- n. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dalam penguatan literasi kewirausahaan, pengembangan wirausaha muda, serta pembinaan UMKM berbasis kebudayaan, kerajinan, dan ekonomi kreatif;
- o. Dinas Lingkungan Hidup, dalam fasilitasi standar produksi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah UMKM;
- p. Dinas Kelautan dan Perikanan, dalam pengembangan UMKM berbasis hasil perikanan dan hilirisasi produk olahan;
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam pemberdayaan UMKM perempuan dan pengembangan usaha keluarga produktif; serta
- r. Dinas Kesehatan, dalam fasilitasi perizinan PIRT, pemeriksaan kesehatan pangan, dan penerapan standar keamanan produk UMKM makanan dan minuman.

Kemitraan lintas sektor ini memperkuat peran Dinas KUMK sebagai koordinator utama dalam pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga setiap program dapat dilaksanakan secara sinergis dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat.

2.1.6. Dukungan BUMD dalam pemberian pelayanan

Penyelenggaraan pelayanan publik di bidang koperasi dan usaha mikro tidak lepas dari peran strategis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai mitra pembangunan ekonomi daerah. Di Kabupaten Kutai Kartanegara, kolaborasi antara Dinas Koperasi dan UKM dengan BUMD, khususnya PT. Bankaltimtara, menjadi pilar utama dalam mendukung permodalan bagi pelaku usaha melalui program Kredit Kukar Idaman (Kredit dengan bunga 0%). Program ini dirancang untuk memutus mata rantai rentenir serta memberikan stimulan bagi wirausaha baru dan UMKM untuk naik kelas tanpa terbebani oleh bunga pinjaman yang tinggi.

Selain dukungan permodalan, peran BUMD juga diarahkan pada penguatan ekosistem pemasaran dan distribusi produk lokal. Melalui sinergi dengan BUMD di sektor aneka usaha, produk-produk hasil koperasi dan UMKM didorong untuk masuk ke dalam rantai pasok lokal dan memenuhi kebutuhan pasar domestik. Dukungan ini mencakup fasilitasi gerai produk lokal di tempat strategis serta kolaborasi dalam penyediaan bahan baku bagi koperasi sektor pertanian. Kemitraan ini memastikan bahwa setiap program

pemberdayaan yang dijalankan oleh Dinas Koperasi dan UKM didukung oleh infrastruktur finansial dan pasar yang memadai, sehingga menciptakan ekosistem usaha yang berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Lebih lanjut, dukungan BUMD dalam pemberian pelayanan juga diwujudkan melalui pendampingan literasi keuangan. BUMD secara berkala terlibat dalam pelatihan manajemen keuangan bagi pengurus koperasi dan pelaku UMKM yang difasilitasi oleh Dinas. Integrasi antara pendampingan teknis dari dinas dengan dukungan finansial dari BUMD ini menjadi kunci dalam meningkatkan indikator 'Persentase UMKM yang Telah Difasilitasi', yang pada periode sebelumnya menunjukkan tingkat capaian target sebesar 100%. Sinergi ini akan terus diperkuat dalam periode 2025-2029 melalui optimalisasi Klinik UMKM di setiap kecamatan sebagai pusat informasi dan akses layanan BUMD terpadu.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis

2.2.1. Permasalahan Layanan perangkat Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode 2022–2024, diperoleh gambaran objektif bahwa meskipun banyak target administratif telah tercapai, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar yang mempengaruhi kualitas dampak pelayanan kepada koperasi dan UMKM. Permasalahan ini diidentifikasi melalui analisis mendalam terhadap kondisi faktual di lapangan serta pemetaan akar masalah yang menghambat optimalisasi kinerja pelayanan.

Perumusan permasalahan ini merujuk pada sinkronisasi dokumen perencanaan yang lebih tinggi, khususnya RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, guna memastikan kesinambungan arah kebijakan pada periode 2025–2029. Pemahaman yang komprehensif terhadap akar masalah ini menjadi landasan vital dalam penyusunan isu strategis, penetapan tujuan, sasaran, serta perumusan program unggulan seperti Klinik UMKM agar lebih efektif, terukur, dan tepat sasaran dalam menjawab tantangan ekonomi kerakyatan.

Secara umum, permasalahan pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara dapat dikelompokkan ke dalam tiga kategori utama, sebagaimana disajikan pada tabel perumusan permasalahan berikut.

Tabel 2. 5 Perumusan Permasalahan Dinas Koperasi dan UKM

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Belum memadainya kompetensi SDM pengelola koperasi	Rendahnya kualitas kelembagaan dan kesehatan keuangan koperasi (Realisasi kesehatan KSP/USP 2024 hanya 63,84%).	1) Kurangnya pemahaman pengelola terhadap manajemen risiko dan tata kelola keuangan. 2) Belum optimalnya digitalisasi sistem pelaporan dan administrasi koperasi. 3) Terbatasnya frekuensi pelatihan sertifikasi kompetensi bagi pengurus dan pengawas.
2	Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	Rendahnya pertumbuhan wirausaha baru (0,41% pada 2024) dan terbatasnya UMKM yang mampu naik kelas.	1) Belum terpenuhinya standarisasi produk (Halal, BPOM, PIRT) secara menyeluruh. 2) Keterbatasan akses terhadap teknologi produksi dan pemasaran digital. 3) Kurangnya inovasi desain kemasan produk agar mampu bersaing di pasar modern.
3	Belum optimalnya akuntabilitas dan efektivitas pelayanan	Adanya penurunan nilai SAKIP menjadi 61,54 pada tahun 2024 dan belum terintegrasinya data UMKM.	1) Sistem pengukuran kinerja belum sepenuhnya berorientasi pada dampak nyata (<i>outcome</i>). 2) Belum tersedianya basis data tunggal (Satu Data UMKM) yang akurat dan <i>real-time</i> . 3) Sarana pendampingan di tingkat kecamatan (Klinik UMKM) belum berfungsi optimal secara merata.

Sumber: hasil analisis, 2025

2.2.2. Isu Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja, identifikasi potensi dan permasalahan pelayanan, serta telaahan terhadap berbagai dokumen perencanaan pembangunan, antara lain RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, RPJMD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025–2029, RPJMN Tahun 2025–2029, serta Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, dengan tetap memperhatikan dinamika perkembangan ekonomi global dan nasional, maka dirumuskan sejumlah isu strategis yang relevan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMK).

Isu-isu strategis tersebut mencerminkan tantangan utama yang harus dihadapi dan dijawab oleh perangkat daerah dalam kurun waktu 2025–2029, sekaligus menjadi landasan dalam penyusunan tujuan, sasaran, strategi, serta arah kebijakan Dinas KUMK agar pelaksanaan pembangunan sektor ekonomi kerakyatan dapat berjalan secara efektif dan adaptif terhadap perubahan.

Adapun rincian keterkaitan antara potensi daerah, permasalahan pelayanan, dan dinamika lingkungan strategis disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 2. 6 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Koperasi dan UKM

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan PD	PERMASALAHAN	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
1	2	3	4	5	6	7
Kelembagaan Koperasi yang tersebar luas.	Belum memadainya kompetensi SDM pengelola koperasi	Penguatan ketahanan ekonomi masyarakat yang inklusif dan berkelanjutan (Ekonomi Hijau).	Transformasi Digital & Industri 5.0: Adopsi teknologi AI, IoT, dan digitalisasi pasar untuk efisiensi produksi serta menjawab pergeseran budaya konsumen global.	Regulasi & Satu Data: Implementasi UU Cipta Kerja (NIB), integrasi Satu Data UMKM (SIDT), dan target rasio kewirausahaan nasional 4%.	Mitra Strategis IKN: Peluang Kutai Kartanegara sebagai penyangga pangan dan jasa bagi IKN serta tantangan persaingan produk antar daerah.	Akselerasi daya saing produk dan profesionalisme SDM Koperasi/UKM melalui transformasi digital dan diversifikasi ekonomi hijau guna memperkuat ekonomi lokal di kawasan mitra IKN.
Produk lokal berbasis Pertanian, Perikanan, dan Ekraf.	Masih rendahnya daya saing produk usaha mikro	Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat dan UMKM (Keseimbangan Ekonomi-Ekologi).	Geopolitik & Geoekonomi: Ketidakpastian rantai pasok global yang menuntut penguatan kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal (lokalitas).	Resiliensi Ekonomi: Fokus pada prospek ekonomi positif melalui penguatan UMKM sebagai jaring pengaman ekonomi nasional.	Hilirisasi & Interkonektivitas: Kebijakan Provinsi untuk memperkuat konektivitas distribusi produk UMKM antar kabupaten di Kalimantan Timur.	Transformasi UMKM dari Sektor Ekstraktif ke Non-Ekstraktif melalui hilirisasi produk unggulan daerah yang berorientasi pasar luas (IKN & Nasional).

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara menerjemahkan lima (5) misi Bupati dan Wakil Bupati ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah sebagai dasar penyelenggaraan pembangunan lima tahunan. Berdasarkan tugas, fungsi, serta kewenangan yang dimiliki, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) berperan dalam mendukung pencapaian Misi 2, yaitu *“Terbaik dalam mewujudkan pengembangan hilirisasi sektor pertanian, pariwisata, dan ekonomi kreatif sebagai fondasi ekonomi baru non-ekstraktif.”*

Misi tersebut selanjutnya dijabarkan ke dalam Tujuan 1, yaitu *meningkatnya fondasi perekonomian yang maju, terintegrasi, dan berkelanjutan*, dengan indikator kinerja berupa Laju Pertumbuhan Ekonomi dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

Sejalan dengan tujuan tersebut, sasaran pembangunan daerah yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas KUKM adalah Sasaran 1.1, yaitu *meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah*, dengan indikator kinerja Pertumbuhan PDRB Sektor Non-Ekstraktif. Sasaran ini menjadi dasar bagi Dinas KUKM dalam merumuskan tujuan perangkat daerah, sasaran strategis, serta strategi dan arah kebijakan yang berfokus pada penguatan koperasi, pemberdayaan UMKM, dan pengembangan wirausaha berbasis potensi lokal.

3.1. Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, serta hasil identifikasi isu strategis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUMK) menetapkan satu tujuan utama, yaitu:

“Meningkatkan daya saing koperasi dalam mendukung perkembangan
Usaha Mikro dan Kecil.”

Tujuan ini menegaskan arah kebijakan Dinas KUMK dalam menjadikan koperasi sebagai penggerak utama penguatan ekonomi kerakyatan. Peningkatan daya saing koperasi tidak hanya dimaknai sebagai perbaikan

tata kelola dan kelembagaan, tetapi juga mencakup peningkatan akses pembiayaan, penguatan kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi, serta perluasan akses pasar.

Melalui koperasi yang sehat, profesional, dan adaptif, pelaku usaha mikro dan kecil diharapkan memperoleh dukungan yang memadai untuk meningkatkan skala usaha (*naik kelas*), memperluas jejaring usaha, serta meningkatkan produktivitas dan kualitas produk. Pada akhirnya, pencapaian tujuan ini berkontribusi terhadap transformasi ekonomi daerah menuju struktur ekonomi yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kerakyatan, sekaligus mendukung penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan daya saing ekonomi Kabupaten Kutai Kartanegara secara berkelanjutan.

3.2. Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025–2029

Pembangunan koperasi dan UMKM di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2029 merupakan satu alur transformasi yang terintegrasi, dimulai dari penguatan basis data melalui sistem *online* untuk menjamin akurasi volume usaha yang sempat fluktuatif pada masa transisi 2022-2024.

Gambar 3. 1 Konsep Renstra PD

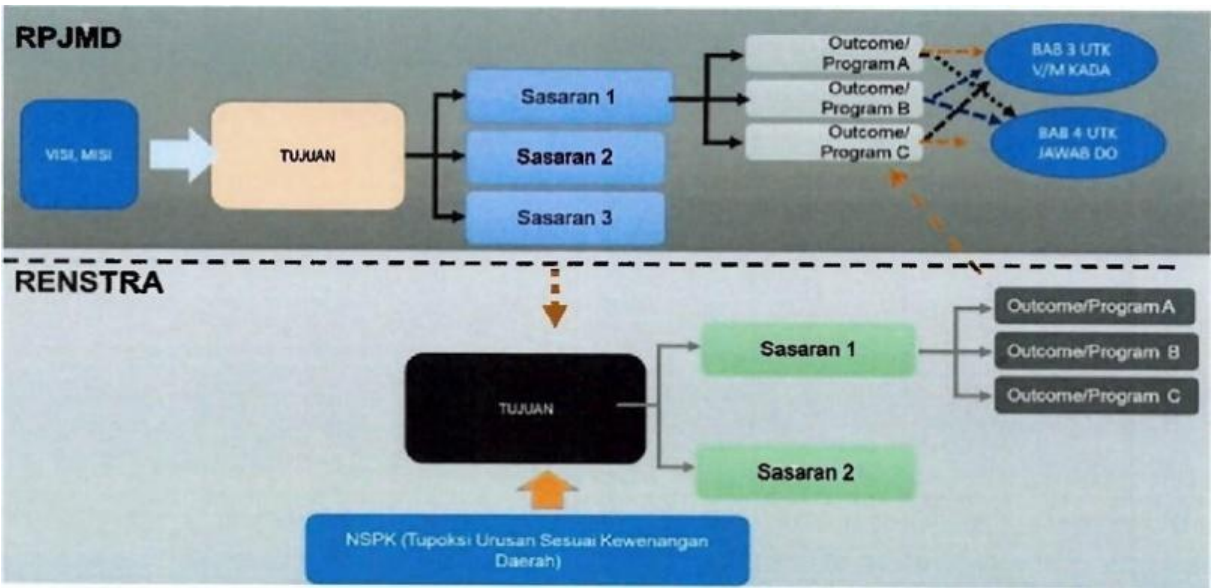


Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Alur ini kemudian berlanjut pada akselerasi kualitas usaha mikro dengan mendorong transformasi status dari informal ke formal, guna memberikan kepastian hukum dan daya saing bagi pelaku usaha lokal dalam

menghadapi dinamika ekonomi global serta peluang sebagai mitra strategis IKN. Puncak dari alur ini adalah terwujudnya koperasi yang tidak hanya aktif secara kuantitas, tetapi juga sehat secara manajerial dan finansial, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Gambar 3. 2 Keraangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra PD



Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Pembangunan koperasi dan UKM di Kabupaten Kutai Kartanegara periode 2025–2029 merupakan satu alur transformasi yang terintegrasi, dimulai dari penguatan basis data melalui sistem daring untuk menjamin akurasi volume usaha yang sempat fluktuatif pada masa transisi 2022-2024. Alur ini kemudian berlanjut pada akselerasi kualitas usaha mikro dengan mendorong transformasi status dari informal ke formal, guna memberikan kepastian hukum dan daya saing bagi pelaku usaha lokal dalam menghadapi dinamika ekonomi global serta peluang sebagai mitra strategis IKN. Puncak dari alur ini adalah terwujudnya koperasi yang tidak hanya aktif secara kuantitas, tetapi juga sehat secara manajerial dan finansial, sehingga mampu menjadi pilar utama dalam memperkuat struktur ekonomi kerakyatan yang mandiri, inklusif, dan berkelanjutan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Untuk mewujudkan tujuan “Meningkatkan daya saing koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM”, Dinas Koperasi dan UMK Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan tiga sasaran strategis. Pertama, meningkatnya kualitas usaha mikro, yang diarahkan untuk meningkatkan

proporsi usaha mikro yang berhasil berkembang menjadi usaha kecil dan menengah, sebagai indikator penguatan daya saing UMKM secara bertahap. Kedua, meningkatnya kewirausahaan, yang menekankan target peningkatan jumlah wirausaha baru yang inovatif dan berkelanjutan, sehingga mendorong penciptaan lapangan kerja, diversifikasi usaha, dan peningkatan produktivitas daerah. Ketiga, meningkatnya kinerja koperasi aktif dan sehat, yang menekankan kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah agar semakin signifikan dan berkelanjutan, sejalan dengan upaya memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

Setiap sasaran tersebut dilengkapi dengan indikator kinerja sebagai tolok ukur pencapaian. Berdasarkan realisasi sejak tahun 2022, pertumbuhan volume usaha koperasi menunjukkan fluktuasi; pada tahun 2022 tercatat -17,75%, kemudian meningkat menjadi 74,58% pada 2023 dan mencapai 108,28% pada 2024. Peningkatan signifikan ini dipengaruhi oleh perubahan metode pengumpulan data, dari yang sebelumnya dilakukan secara manual menjadi sistem online, sehingga cakupan data menjadi lebih luas dan akurat. Target pertumbuhan volume usaha koperasi ditetapkan secara bertahap mulai 2025 sebesar 2%, meningkat hingga 3,5% pada 2030, mencerminkan orientasi pada penguatan koperasi yang aktif dan sehat.

Sementara itu, indikator usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal menunjukkan tren pertumbuhan yang konsisten. Realisasi pada 2022 mencapai 72,62%, kemudian meningkat menjadi 73,62% pada 2023 dan 74,21% pada 2024. Transformasi ini menjadi indikator penting bagi peningkatan kualitas usaha mikro, memperkuat daya saing UMKM, dan mendorong stabilitas ekonomi lokal. Target indikator ini ditetapkan meningkat secara bertahap setiap tahun, dari 74,85% pada 2025 hingga 79,06% pada 2030.

Dengan adanya indikator kinerja utama (IKU) ini, arah pembangunan koperasi dan UMKM dapat dimonitor dan dievaluasi secara konsisten, sehingga memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara dan mendukung tercapainya ekonomi kerakyatan yang berkelanjutan.

Tabel 3. 1 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UMK

NSPK & Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Baseline	Target						Formulasi
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
NSPK: 1) UU No.25 Tahun 1992; 2) UU no.20 Tahun 2008; 3) UU No.23 Tahun 2014; 4) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021; 5) Peraturan Presiden No.2 Tahun 2022; 6) Permenkop UKM No.9 Tahun 2020	Meningkatkan daya saing koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM		Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap PDRB (%)	n/a	0,4199%	0,5743%	0,7159%	0,8059%	0,9218%	1,0118%	Volume usaha koperasi & UMK ÷ PDRB ADHB
		Meningkatnya kualitas usaha mikro	Persentase Wirausaha Mapan (%)	n/a	0,2095%	0,3186%	0,5354%	0,8564%	0,9550%	1,2647%	UM naik kelas ÷ jumlah UM × 100%
		Meningkatnya kewirausahaan	Rasio Kewirausahaan (%)	0,1184%	11,937%	12,029%	12,121%	12,213%	12,305%	12,397%	Jumlah wirausaha ÷ angkatan kerja
Sasaran RPJMD: Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah		Meningkatnya kinerja koperasi aktif dan sehat	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB* (angka)	0,2910	0,3037	0,3164	0,3291	0,3418	0,3545	0,3672	Volume usaha koperasi ÷ PDRB ADHB

Sumber: hasil analisis, 2025

Keterangan: * Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB diluar sektor pertambangan dan penggalian

3.3. Strategi Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Untuk mencapai tujuan *“Meningkatkan daya saing koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM”* serta sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara menetapkan enam strategi utama, yaitu:

1. Penguatan kapasitas SDM koperasi dan UMKM, termasuk kaderisasi pengelola melalui pelatihan, sertifikasi, pembinaan kader, serta literasi keuangan secara inklusif, termasuk bagi kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga.
2. Peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, melalui fasilitasi Rapat Anggota Tahunan (RAT), pembinaan koperasi sehat, dan pengawasan yang sistematis.
3. Transformasi usaha mikro naik kelas, melalui pendampingan legalitas usaha, fasilitasi akses pembiayaan, sertifikasi mutu produk, serta penerapan inovasi dalam pengembangan usaha.
4. Perluasan akses pasar, dengan pemanfaatan e-commerce dan kegiatan promosi.
5. Pengembangan kewirausahaan daerah, melalui inkubasi usaha baru, layanan klinik UMKM, serta penguatan jejaring dengan dunia usaha.
6. Optimalisasi jejaring dan kemitraan usaha, melalui kolaborasi dengan BUMDes, BUMD, pihak swasta, dan lembaga pembiayaan.

Pelaksanaan strategi tersebut dilakukan secara bertahap sesuai dengan tahapan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Tahapan pembangunan dimaksud disusun sebagai prioritas tahunan untuk memastikan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra Dinas Koperasi dan UKM disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3. 2 Penahapan Rencana Strategi Dinas Koperasi dan UMK

No	Sasaran	Tahun 2026 (Tahap I)	2027 (Tahap II)	2028 (Tahap III)	2029 (Tahap IV)	2030 (Tahap V)
		Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan	Perwujudan fondasi transformasi dalam Kukar Idaman Terbaik	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan
1	Ekonomi	Pengembangan dan penguatan kawasan ekonomi potensial yang terintegrasi dan berkelanjutan : 1) Pemutakhiran Satu Data UMKM digital. 2) Penataan kelembagaan & kesehatan koperasi di kawasan potensial. 3) Sosialisasi perizinan terintegrasi (NIB).	Perluasan pengembangan perekonomian kewilayahan tematik untuk pemberdayaan pelaku usaha masyarakat : 1) Pengembangan produk UMKM unggulan berbasis kecamatan (Agromina/Wisata) 2) Pemberdayaan pelaku usaha di wilayah hulu, tengah, dan pesisir.	Penguatan ekosistem kewirausahaan inovatif dalam mewujudkan produk lokal masyarakat dan hilirisasi sektor strategis 1) Digitalisasi manajemen & pemasaran (Inovasi). 2) Sertifikasi mutu produk (Halal, BPOM, PIRT). 3) Inisiasi hilirisasi produk lokal.	Perwujudan ekonomi mandiri berbasis produk unggulan sebagai fondasi transformasi pusat pangan, pariwisata, industri hijau 1) Pendampingan UMKM "Naik Kelas" secara mandiri. 2) Penguatan koperasi sebagai penyuplai pusat pangan & pariwisata.	Penguatan rantai nilai dan akselerasi hilirisasi komoditas unggulan daerah yang ramah lingkungan guna meningkatkan daya saing dan kesejahteraan 1) Integrasi koperasi/UMKM ke rantai pasok industri hijau & IKN. 2) Akselerasi pemasaran produk unggulan berdaya saing global.
2	Tata Kelola	Penguatan regulasi dan tata kelola serta infrastruktur digitalisasi pelayanan publik yang adaptif, konsisten dan implementatif : 1) Standarisasi SOP pelayanan Klinik UMKM.	Peningkatan kompetensi dan kapasitas aparatur serta penguatan kelembagaan organisasi perangkat daerah	Penerapan Digitalisasi layanan publik dan penguatan sistem pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas	Perwujudan tata kelola dan sistem evaluasi pembangunan yang adaptif, konsisten, serta implementatif sebagai instrumen peningkatan kinerja pembangunan.	Penguatan kolaborasi multipihak (pemerintah, masyarakat, swasta) dalam tata kelola pembangunan

No	Sasaran	Tahun 2026 (Tahap I)	2027 (Tahap II)	2028 (Tahap III)	2029 (Tahap IV)	2030 (Tahap V)
		Pemenuhan fondasi infrastruktur wilayah dan penataan kelembagaan	Pemerataan transformasi pembangunan berbasis kewilayahan	Peningkatan kemanfaatan transformasi pembangunan	Perwujudan fondasi transformasi dalam Kukar Idaman Terbaik	Pemantapan Menuju Akselerasi Transformasi Pembangunan
		2) Pengembangan platform integrasi data internal PD. 3)				

3.4. Arah Kebijakan Perangkat Daerah dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan UKM, dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD. Lebih lanjut, Arah kebijakan Dinas Koperasi dan UKM 2025–2029 merupakan operasionalisasi strategi untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan, dengan penyajian sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONAL NSPK /SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
1	NSPK: 3) UU No.25 Tahun 1992; 4) UU no.20 Tahun 2008; 5) UU No.23 Tahun 2014; 6) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021; 7) Peraturan Presiden No.2 Tahun 2022; 8) Permenkop UKM No.9 Tahun 2020	– Penguatan potensi usaha pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata – Hilirisasi hasil pertanian, perikanan, dan budaya menjadi produk bernilai tambah – Peningkatan literasi kewirausahaan dan akses pembiayaan mikro – Inkubasi bisnis UMKM unggulan dan kreatif – Pemasaran produk unggulan desa berbasis digital – Transformasi menuju ekonomi rendah karbon	– Mengoptimalkan pendataan termasuk data terpilah, memfasilitasi kemudahan perizinan, memperkuat kelembagaan, mendampingi pengembangan usaha terutama kepada kelompok rentan dan perempuan kepala keluarga, dan mengkoordinasikan pemberdayaan usaha mikro bersama pemangku kepentingan untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro. – Menumbuhkan dan mengembangkan kewirausahaan berbasis usaha mikro melalui fasilitasi inkubasi usaha termasuk kepada perempuan, pemuda dan kelompok perempuan yang memiliki keterbatasan akses, pendampingan peningkatan skala usaha, penguatan kapasitas SDM, pengembangan produksi dan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi dan desain produk . – Meningkatkan jumlah dan kualitas koperasi yang aktif, sehat, dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola, pemeriksaan dan pengawasan rutin, penilaian kesehatan koperasi,	
2	Sasaran RPJMD: Meningkatnya pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah			

NO	OPERASIONAL NSPK /SASARAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET.
			peningkatan kapasitas SDM perkoperasian, fasilitasi akses permodalan, serta pemberdayaan kelembagaan dan kemitraan koperasi terutama bagi anggota dari kelompok rentan.	

Sumber: hasil analisis, 2025

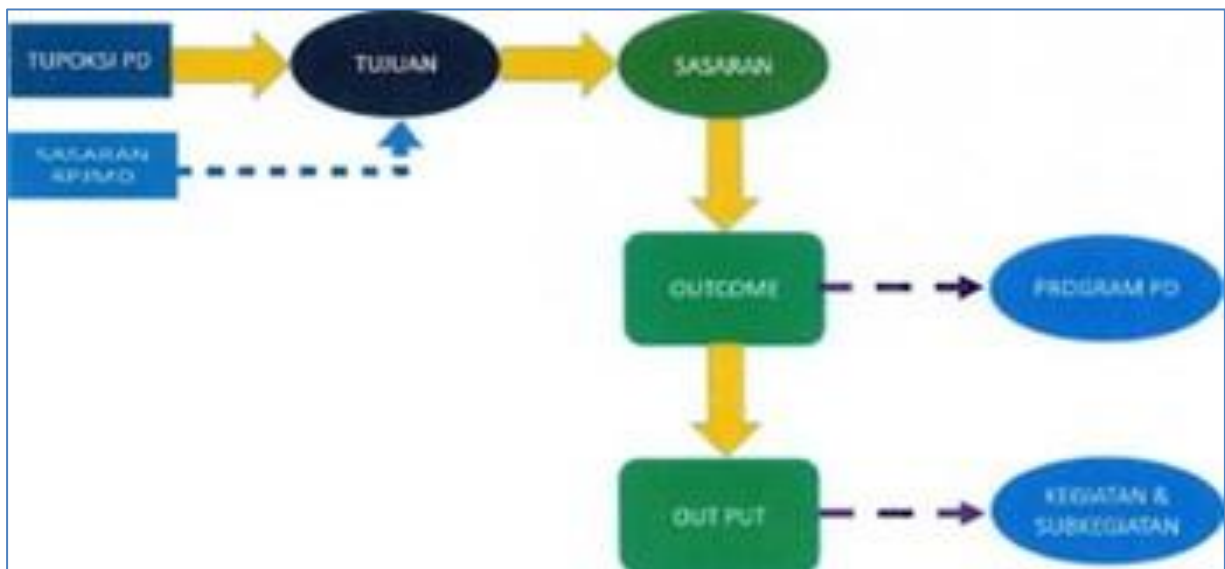
BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA

PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, ditetapkan program, kegiatan, dan subkegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Alur perencanaan pembangunan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah ini merupakan sebuah proses *cascading* yang sistematis dan terintegrasi dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Gambar 4. 1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Subkegiatan Renstra PD



Sumber: Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025

Proses ini bermula dari penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah yang diturunkan menjadi Tujuan dan Sasaran RPJMD, di mana setiap sasaran tersebut diselaraskan menjadi Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Koperasi dan UKM. Dalam perumusannya, Perangkat Daerah mempertimbangkan Isu Strategis yang meliputi masalah faktual, dinamika lingkungan, serta potensi daerah, dengan tetap memperhatikan koridor NSPK (Norma, Standar,

Prosedur, dan Kriteria) sebagai dasar operasional guna memastikan kebijakan yang diambil selaras dengan kewenangan urusan pemerintahan yang diemban. Melalui rangkaian ini, setiap Output kegiatan dipastikan berkontribusi langsung pada pencapaian Outcome sasaran dan tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan

Penyusunan Strategi dan Arah Kebijakan Perangkat Daerah tidak hanya merujuk pada dokumen perencanaan di atasnya, tetapi juga harus mempertimbangkan analisis Isu Strategis yang mencakup identifikasi masalah aktual, dinamika lingkungan strategis, serta pemanfaatan potensi daerah. Strategi tersebut kemudian dioperasionalkan ke dalam rangkaian Program, Kegiatan, dan Sub-kegiatan yang merupakan penjabaran dari strategi serta arah kebijakan pembangunan daerah. Seluruh rangkaian kerja ini dirancang secara terukur untuk menghasilkan Output (keluaran) yang secara langsung berkontribusi pada pencapaian Outcome (dampak/sasaran), sehingga keberhasilan pelayanan Dinas Koperasi dan UKM dapat dipastikan selaras dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian target pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara secara keseluruhan.

Setiap program yang disusun juga harus memperhatikan prinsip *value for money*, meliputi efisiensi, efektivitas, dan ekonomis, serta menjamin kesinambungan pembangunan yang selaras dengan target pembangunan nasional. Dengan demikian, instrumen operasional ini memastikan tercapainya daya saing koperasi, usaha mikro yang naik kelas, serta perluasan kewirausahaan daerah secara optimal.

4.1. Uraian Program

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029, ditetapkan beberapa program pembangunan yang merupakan penjabaran dari strategi dan arah kebijakan. Program-program tersebut mencakup bidang urusan koperasi dan UMKM, serta urusan penunjang pemerintahan daerah.

Adapun program-program Dinas Koperasi dan UKM untuk periode 2025–2029 diuraikan sebagai berikut:

- 1) Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Kecil, dan Mikro (UMKM)
Program ini diarahkan untuk memperkuat kapasitas usaha mikro dan meningkatkan daya saingnya agar mampu naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah.
- 2) Program Pengembangan UMKM
Program ini ditujukan untuk mendukung transformasi usaha mikro agar naik kelas serta menumbuhkan wirausaha baru yang inovatif dan berdaya saing tinggi.
- 3) Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi
Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan kesehatan koperasi agar tetap aktif, sehat, dan profesional.
- 4) Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi
Program ini bertujuan untuk menilai, memantau, dan meningkatkan kesehatan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan Unit Simpan Pinjam (USP) agar koperasi dapat beroperasi secara berkelanjutan, aman, dan memberikan manfaat maksimal bagi anggotanya.
- 5) Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian
Program ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia koperasi melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi bagi pengelola serta anggota koperasi, sehingga mampu mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
- 6) Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi
Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan koperasi, memberikan perlindungan terhadap dinamika perekonomian, dan memastikan koperasi mampu beradaptasi serta tumbuh secara berkelanjutan.
- 7) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
Program ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah lainnya yang terkait dengan pembinaan koperasi dan UMKM, serta memastikan integrasi dengan program pembangunan daerah.

Seluruh program ini disusun untuk mendukung pencapaian sasaran strategis Dinas Koperasi dan UMKM secara terukur, berkelanjutan, dan sejalan dengan prioritas pembangunan daerah serta target nasional.

4.2. Uraian Kegiatan

Kegiatan Perangkat Daerah merupakan serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (output) yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian hasil (outcome) program. Kegiatan disusun sebagai instrumen operasional dalam mengimplementasikan kebijakan, strategi, dan arah pembangunan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Pelaksanaan kegiatan mengacu pada prioritas pembangunan daerah, sasaran strategis Perangkat Daerah, serta indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Setiap kegiatan dirancang secara terencana, terukur, dan berkesinambungan untuk menjawab permasalahan, tantangan, serta kebutuhan pengembangan koperasi dan UMKM, baik dari aspek kelembagaan, usaha, sumber daya manusia, akses permodalan, akses pasar, maupun pemanfaatan teknologi.

Uraian kegiatan dalam Renstra ini mencakup kegiatan pada urusan koperasi dan UMKM serta kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah. Seluruh kegiatan dipilih berdasarkan keterkaitannya dengan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah, sehingga pelaksanaannya diharapkan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan daya saing, kemandirian, dan keberlanjutan koperasi dan UMKM, sekaligus mendukung pencapaian target kinerja pembangunan daerah.

4.2.1. Urusan Koperasi

a. Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi

Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan koperasi menjalankan prinsip-prinsip perkoperasian serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengawasan dan pemeriksaan menjadi

instrumen pembinaan guna mendorong terciptanya tata kelola koperasi yang sehat, transparan, dan akuntabel.

b. Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Kegiatan ini bertujuan menilai tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam koperasi melalui indikator kelembagaan, manajemen, permodalan, kualitas aset, dan likuiditas. Hasil penilaian digunakan sebagai dasar penetapan kebijakan pembinaan dan penguatan koperasi.

c. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian

Kegiatan ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia koperasi, meliputi pengurus, pengawas, dan anggota, agar memiliki kompetensi manajerial dan pemahaman perkoperasian yang memadai.

d. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi

Kegiatan ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan dan usaha koperasi melalui pembinaan, fasilitasi, serta perlindungan terhadap praktik usaha yang tidak sehat, guna menjamin keberlanjutan koperasi.

e. Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini mendorong pengembangan kemitraan strategis koperasi dengan dunia usaha, BUMD, dan pihak terkait lainnya untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan skala usaha.

f. Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan akses koperasi terhadap sumber pembiayaan guna mendukung pengembangan usaha koperasi secara berkelanjutan.

g. Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kepatuhan koperasi dalam penyampaian laporan kelembagaan dan keuangan secara tepat waktu dan akurat.

- h. Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan ini berfokus pada penguatan kapasitas kelembagaan, manajemen, dan usaha koperasi agar mampu meningkatkan kinerja dan manfaat ekonomi bagi anggota.

4.2.2. Urusan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- a. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Kegiatan ini bertujuan meningkatkan daya saing UMKM melalui pembinaan, pendampingan, dan fasilitasi pengembangan usaha secara terpadu.

- b. Pengembangan Usaha Mikro

Kegiatan ini diarahkan untuk mendorong usaha mikro naik kelas melalui peningkatan kapasitas produksi, manajemen usaha, dan akses pasar.

- c. Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan

Kegiatan ini dilaksanakan untuk menumbuhkan wirausaha baru dan mengembangkan jiwa kewirausahaan masyarakat.

- d. Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro

Kegiatan ini menyediakan dukungan inkubasi usaha bagi pelaku usaha mikro pemula agar mampu berkembang secara berkelanjutan.

- e. Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

Kegiatan ini mendorong kemitraan usaha mikro dengan usaha menengah, besar, dan pihak lainnya untuk meningkatkan nilai tambah produk.

- f. Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

- g. Kegiatan ini memberikan pendampingan dalam pengurusan perizinan usaha mikro guna meningkatkan legalitas dan akses program pemberdayaan.

- h. Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
Kegiatan ini difokuskan pada penguatan kelembagaan pendukung

usaha mikro sebagai wadah pengembangan potensi ekonomi masyarakat.

4.3. Uraian Sub Kegiatan

Sub Kegiatan merupakan bentuk aktivitas kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang undangan. Kegiatan dan sub kegiatan yang dilakukan mencakup berbagai aspek, mulai dari pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, peningkatan kapasitas SDM, penguatan kelembagaan koperasi, hingga evaluasi kinerja perangkat daerah. Semua kegiatan yang dilaksanakan akan dijabarkan lebih lanjut melalui subkegiatan yang akan menunjukkan langkah-langkah operasional spesifik. Setiap kegiatan dan subkegiatan disertai dengan target tahunan yang terukur, indikator kinerja, serta pagu indikatif yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut secara efektif.

Penentuan program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan hasil dari cascading kinerja Dinas Koperasi dan UKM, mulai dari tujuan, sasaran, outcome sampai ke output. Tujuan, sasaran, outcome sampai ke output Renstra merupakan kinerja yang ingin dicapai atau dihasilkan. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan penggunaan sumber daya pembangunan. Untuk mengukur kinerja program dan kegiatan serta sub kegiatan diperlukan indikator kinerja. Indikator kinerja adalah ukuran yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan. Tabel teknik menentukan program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Koperasi dan UKM dimuat pada tabel di bawah:

Tabel 4. 1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
NSPK: 1) UU No.25 Tahun 1992; 2) UU no.20 Tahun 2008; 3) UU No.23 Tahun 2014; 4) Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021; 5) Peraturan Presiden No.2 Tahun 2022; 6) Permenkop UKM No.9 Tahun 2020	Meningkatkan daya saing koperasi dalam mendukung perkembangan UMKM				Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap PDRDB (%)		
		Meningkatnya kualitas usaha mikro			Persentase Wirausaha Mapan		
Sasaran RPJMD: Meningkatkan pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri		Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	
					Pertumbuhan Wirausaha		

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Cakupan Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang diberdayakan	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	
				Dokumen laporan jumlah unit usaha yang menjalin kemitraan usaha mikro setiap tahun	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	
				Dokumen rekap data usaha mikro yang memperoleh NIB/Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	
				Laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan (jumlah peserta, jenis materi, frekuensi kegiatan)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen berita acara, daftar hadir, dan notulen koordinasi dengan pemangku kepentingan pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
				Database/rekapitulasi unit usaha mikro yang terdaftar dalam basis data daerah	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata	Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	
				Sertifikat atau daftar peserta pelatihan/kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	
		Meningkatnya kewirausahaan			Rasio Kewirausahaan		
			Meningkatnya daya saing UMKM		Persentase Usaha Mikro Naik Kelas	Program Pengembangan UMKM	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Meningkatnya Jumlah Usaha Mikro yang berkembang	Jumlah Usaha Mikro yang berkembang	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	
				Laporan fasilitasi pengembangan usaha mikro (alat, modal, pemasaran)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Pengembangan Usaha Mikro	
				Dokumen daftar penerima fasilitasi kewirausahaan per tahun	Jumlah yang Difasilitasi	Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
				Laporan pelaksanaan inkubasi usaha mikro (jenis usaha, progres, hasil akhir)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi	Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
				Laporan fasilitasi per bidang (produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain, teknologi) beserta data UMKM penerima	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
		Meningkatnya kinerja koperasi aktif dan sehat			Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB		
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi		Persentase Koperasi Aktif	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	
				Meningkatnya cakupan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan Pemeriksaan dan Pengawasan	Jumlah Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang mendapatkan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	
				Dokumen hasil penguatan tata kelola kelembagaan koperasi (manual SOP, pelatihan manajemen)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	
				Laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi sesuai standar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan	Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
						Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi		Persentase KSP/USP yang Sehat dan Cukup Sehat	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	
				Meningkatnya tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang dilakukan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
				Dokumen laporan hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten	
				Rekapitulasi hasil penilaian kesehatan koperasi per tahun (rating	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				sehat/cukup sehat/tidak sehat)		Keuangan, dan Permodalan	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian		Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	
				Meningkatnya kualitas SDM Perkoperasian	Jumlah koperasi yang diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Daftar peserta dan sertifikat pelatihan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	
			Meningkatnya produktivitas koperasi		Persentase Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	
					Pertumbuhan volume usaha koperasi		
				Meningkatnya Pemberdayaan &	Jumlah Koperasi yang Keanggotaannya	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				perlindungan Koperasi	dalam Daerah Kabupaten yang dilakukan Pemberdayaan dan Perlindungan	Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	
				Dokumen perjanjian/nota kesepahaman kemitraan koperasi dengan pihak ketiga	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya	Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	
				Laporan intervensi produktivitas dan penguatan koperasi (akses modal, akses pasar, restrukturisasi manajemen)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
				Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi permodalannya dan laporan keuangan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya	Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi penyusunan laporan RAT dan laporan keuangan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya	Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	
				Database koperasi yang memiliki legalitas keanggotaan sesuai wilayah administrasi	Jumlah Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten	
			Meningkatnya tata kelola dan kualitas pelayanan perangkat daerah		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen Renstra, Renja, RKPD yang disusun & ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi per tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Dokumen laporan evaluasi kinerja tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Dokumen wali data statistik sektoral (metadata, data series, hasil verifikasi)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Wali data Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
				Rekap data statistik sektoral yang terverifikasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	
				Berita acara forum perangkat daerah sesuai bidang urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Perencanaan Perangkat Daerah	Perencanaan Perangkat Daerah	
				Meningkatnya Laporan Administrasi Keuangan Yang akuntabel	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan yang Akuntabel	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
				Daftar penerima gaji & tunjangan ASN per periode	Jumlah Orang yang Menerima Gaji danTunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
				Laporan keuangan tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Laporan keuangan per periode (bulanan, triwulanan, semesteran)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Dokumen analisis prognosis realisasi anggaran per triwulan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD yang direkonsiliasi	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Dokumen perencanaan kebutuhan BMD per tahun	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen penilaian & berita acara penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	
				Dokumen laporan rekonsiliasi BMD & laporan semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Laporan administrasi	Jumlah laporan Administrasi	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Kepegawaian Perangkat Daerah	Kepegawaian Perangkat Daerah		
				Berita acara serah terima pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
				Daftar peserta dan sertifikat pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Administrasi umum Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Berita acara pengadaan & pemasangan instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Berita acara serah terima peralatan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Dokumen serah terima bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
					Kantor yang Disediakan		
				Dokumen serah terima cetakan/penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
				Daftar bahan bacaan & peraturan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
				Dokumen notulen, berita acara & daftar hadir rapat koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Dokumen dukungan pelaksanaan SPBE (laporan, checklist, bukti implementasi)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Meningkatnya Kualitas Laporan	Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Pengadaan Barang Milik Daerah		Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
				BAST (berita acara serah terima) kendaraan dinas/jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				BAST kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
				BAST pengadaan gedung kantor/bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Dokumen pengadaan sarana & prasarana gedung kantor	Jumlah Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Meningkatnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				Laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Meningkatnya Kualitas Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Laporan pemeliharaan kendaraan dan bukti pembayaran pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Laporan pemeliharaan peralatan & mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
				Laporan pemeliharaan/reha	Jumlah Sarana dan Prasarana	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana	

NSPK DAN SASARAN YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGI ATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8
				bilitasi sarana prasarana gedung kantor	Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4. 2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				27.085. 435.39 4,00		24.392.1 65.954,5 6		26.010. 526.95 5,35		29.307.0 13.369,7 6		30.59 4.316 .132, 92		
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.195. 435.39 4,00		13.167.1 65.954,5 6		14.570. 526.95 5,35		13.687.0 13.369,7 6		14.05 9.316 .132, 92		
Meningkatnya Akuntabilitas Dan Tatakelola Kinerja Perangkat Daerah yang Efektif dan Efesien	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	61,54	63,33	12.195. 435.39 4,00	64,5 4	13.167.1 65.954,5 6	65,00	14.570. 526.95 5,35	66,5 4	13.687.0 13.369,7 6	67,54	14.05 9.316 .132, 92	2.17.0.00.0 .00.01.000 0 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				200.00 0.000,0 0		375.000. 000,00		375.00 0.000,0 0		475.000. 000,00		475.0 00.00 0,00		
Dokumen Renstra, Renja, RKPD yang disusun & ditetapkan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	150.00 0.000,0 0	2	150.000. 000,00	2	150.00 0.000,0 0	2	150.000. 000,00	2	150.0 00.00 0,00		
2.17.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				150.00 0.000,0 0		150.000. 000,00		150.00 0.000,0 0		150.000. 000,00		150.0 00.00 0,00		

Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00		
Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi per tahun	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.17.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		

	Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)													
Dokumen laporan evaluasi kinerja tahunan	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.17.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
Dokumen walidata statistik sektoral (metadata, data series, hasil verifikasi)	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah (Dokumen)	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.17.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah				0,00		35.000.000,00		35.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral	0	0	0,00	1	35.000.000,00	1	35.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		

	Daerah (Dokumen)													
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANG AN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Rekap data statistik sektoral yang terverifikasi	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
2.17.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah				0,00		40.000.000,00		40.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah (Data)	0	0	0,00	1	40.000.000,00	1	40.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		

Berita acara forum perangkat daerah sesuai bidang urusan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
2.17.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				0,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

2.17.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				10.139. 437.53 4,00		10.199.9 93.554,5 6		10.999. 897.35 5,35		11.200.0 13.369,7 6		11.53 4.936 .132, 92		
Daftar penerima gaji & tunjangan ASN per periode	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	787	1.260	10.034. 993.55 1,00	1.26 0	10.034.9 93.554,5 6	1.260	10.834. 897.35 5,35	1.26 0	11.035.0 13.369,7 6	1.260	11.36 9.936 .132, 92		
2.17.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				10.034. 993.55 1,00		10.034.9 93.554,5 6		10.834. 897.35 5,35		11.035.0 13.369,7 6		11.36 9.936 .132, 92		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bula n)	787	1.260	10.034. 993.55 1,00	1.26 0	10.034.9 93.554,5 6	1.260	10.834. 897.35 5,35	1.26 0	11.035.0 13.369,7 6	1.260	11.36 9.936 .132, 92		
Laporan keuangan tahunan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	30.000.0 00,00	1	30.000. 000,00	1	30.000.0 00,00	1	30.00 0.000 ,00		
2.17.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		30.000.0 00,00		30.000. 000,00		30.000.0 00,00		30.00 0.000 ,00		

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		
Laporan keuangan per periode (bulanan, triwulanan, semesteran)	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	104.443.983,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
2.17.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				104.443.983,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		110.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		

(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	1	1	104.44 3.983,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00	1	110.000.000,00		
Dokumen analisis prognosis realisasi anggaran per triwulan	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.17.01.2.02.0008 - Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran (Dokumen)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.17.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				50.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Dokumen perencanaan	Jumlah Rencana Kebutuhan	1		0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		

kebutuhan BMD per tahun	Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)													
2.17.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	1		0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
Dokumen penilaian & berita acara penilaian BMD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		
2.17.01.2.03.0003 - Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD				50.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		70.000.000,00		
Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00	1	70.000.000,00		

Dokumen laporan rekonsiliasi BMD & laporan semesteran/tahunan	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.17.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	0	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
2.17.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				50.000.000,00		75.000.000,00		375.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Berita acara serah terima pakaian dinas	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	64		0,00		0,00	90	300.000.000,00		0,00		0,00		
2.17.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				0,00		0,00		300.000.000,00		0,00		0,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas	64		0,00		0,00	90	300.000.000,00		0,00		0,00		

	beserta Atribut Kelengkapan (Paket)													
Daftar peserta dan sertifikat pelatihan pegawai	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	30	50.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.17.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	30	30	50.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00	30	75.000.000,00		
2.17.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				432.398.000,00		432.398.000,00		629.846.200,00		738.220.000,00		755.000.000,00		
Berita acara pengadaan & pemasangan instalasi listrik/penerangan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	30.000.000,00	1	30.000.000,00		

	angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.17.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				10.000. 000,00		10.000.0 00,00		10.000. 000,00		30.000.0 00,00		30.00 0.000 ,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Pener angan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	10.000. 000,00	1	10.000.0 00,00	1	10.000. 000,00	1	30.000.0 00,00	1	30.00 0.000 ,00		
Berita acara serah terima peralatan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	72.398. 000,00	2	72.398.0 00,00	2	72.398. 000,00	2	75.000.0 00,00	2	75.00 0.000 ,00		
2.17.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				72.398. 000,00		72.398.0 00,00		72.398. 000,00		75.000.0 00,00		75.00 0.000 ,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	72.398. 000,00	2	72.398.0 00,00	2	72.398. 000,00	2	75.000.0 00,00	2	75.00 0.000 ,00		
Dokumen serah terima bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik	2	2	50.000. 000,00	2	50.000.0 00,00	2	75.000. 000,00	2	75.000.0 00,00	2	75.00 0.000 ,00		

	Kantor yang Disediakan (Paket)													
2.17.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00	2	75.000.000,00		
Dokumen serah terima cetakan/penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
2.17.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00		
Daftar bahan bacaan & peraturan yang disediakan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00		
2.17.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		

Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00	84	25.000.000,00		
Dokumen notulen, berita acara & daftar hadir rapat koordinasi	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	297.448.200,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00		
2.17.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.000.000,00		150.000.000,00		297.448.200,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	70	150.000.000,00	70	150.000.000,00	70	297.448.200,00	250	300.000.000,00	250	300.000.000,00		
Laporan penatausahaan arsip dinamis SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	133.220.000,00	1	150.000.000,00		

	Dinamis pada SKPD (Dokumen)													
2.17.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		133.220.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	133.220.000,00	1	150.000.000,00		
Dokumen dukungan pelaksanaan SPBE (laporan, checklist, bukti implementasi)	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.17.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	5	50.000.000,00	5	50.000.000,00		
2.17.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				299.648.000,00		1.049.509.000,00		1.142.250.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		

BAST (berita acara serah terima) kendaraan dinas/jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	3	299.64 8.000,0 0	1	949.509. 000,00	3	992.25 0.000,0 0		0,00		0,00		
2.17.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				299.64 8.000,0 0		949.509. 000,00		992.25 0.000,0 0		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	1	3	299.64 8.000,0 0	1	949.509. 000,00	3	992.25 0.000,0 0		0,00		0,00		
BAST kendaraan dinas operasional/lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang	1	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

	Disediakan (Unit)															
BAST pengadaan gedung kantor/bangunan	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
2.17.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00				
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00				
Dokumen pengadaan sarana & prasarana gedung kantor	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	32		0,00	15	100.000.000,00	15	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00				
2.17.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		

Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	32		0,00	15	100.000.000,00	15	150.000.000,00	30	150.000.000,00	30	150.000.000,00		
2.17.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				478.080.000,00		498.080.000,00		498.080.000,00		498.080.000,00		498.080.000,00		
Laporan penyediaan jasa komunikasi, air, dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	225.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00		
2.17.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				225.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		245.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	225.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00	12	245.000.000,00		
Laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang	12	12	253.080.000,00	12	253.080.000,00	12	253.080.000,00	12	253.080.000,00	12	253.080.000,00		

	Disediakan (Laporan)													
2.17.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				253.08 0.000,0 0		253.080. 000,00		253.08 0.000,0 0		253.080. 000,00		253.0 80.00 0,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	12	12	253.08 0.000,0 0	12	253.080. 000,00	12	253.08 0.000,0 0	12	253.080. 000,00	12	253.0 80.00 0,00		
2.17.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				545.87 1.860,0 0		417.185. 400,00		430.45 3.400,0 0		430.700. 000,00		451.3 00.00 0,00		
Laporan pemeliharaan kendaraan dan bukti pembayaran pajak	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	180.70 0.000,0 0	25	180.700. 000,00	25	180.70 0.000,0 0	25	180.700. 000,00	25	181.3 00.00 0,00		
2.17.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				180.70 0.000,0 0		180.700. 000,00		180.70 0.000,0 0		180.700. 000,00		181.3 00.00 0,00		

Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	12	12	180.70 0.000,0 0	25	180.700. 000,00	25	180.70 0.000,0 0	25	180.700. 000,00	25	181.3 00.00 0,00		
Laporan pemeliharaan peralatan & mesin	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	70	80.000. 000,00	70	80.000.0 00,00	70	80.000. 000,00	70	80.000.0 00,00	70	100.0 00.00 0,00		
2.17.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				80.000. 000,00		80.000.0 00,00		80.000. 000,00		80.000.0 00,00		100.0 00.00 0,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	20	70	80.000. 000,00	70	80.000.0 00,00	70	80.000. 000,00	70	80.000.0 00,00	70	100.0 00.00 0,00		
Laporan pemeliharaan peralatan & mesin	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/D irehabilitasi (Unit)	3	2	285.17 1.860,0 0	2	156.485. 400,00	2	169.75 3.400,0 0	2	170.000. 000,00	2	170.0 00.00 0,00		
2.17.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				285.17 1.860,0 0		156.485. 400,00		169.75 3.400,0 0		170.000. 000,00		170.0 00.00 0,00		

Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	2	285.17 1.860,00	2	156.485. 400,00	2	169.75 3.400,00	2	170.000. 000,00	2	170.000.00 0,00				
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI				1.000.000.000, 00		1.250.000.000,00		1.250.000.000, 00		2.200.000.000,00		2.200.000.000, 00				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	24,29	28,90	1.000.000.000, 00	51,81	1.250.000.000,00	53,68	1.250.000.000, 00	55,56	2.200.000.000,00	57,43	2.200.000.000, 00	2.17.000.000.001.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah			
2.17.03.2.01 - Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota				1.000.000.000, 00		1.250.000.000,00		1.250.000.000, 00		2.200.000.000,00		2.200.000.000, 00				

Dokumen hasil penguatan tata kelola kelembagaan koperasi (manual SOP, pelatihan manajemen)	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	175	140	850.00 0.000,0 0	175	1.100.00 0.000,00	175	1.100.0 00.000, 00	190	1.200.00 0.000,00	200	1.200 .000. 000,0 0		
2.17.03.2.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi				850.00 0.000,0 0		1.100.00 0.000,00		1.100.0 00.000, 00		1.200.00 0.000,00		1.200 .000. 000,0 0		
Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi (Unit Usaha)	175	140	850.00 0.000,0 0	175	1.100.00 0.000,00	175	1.100.0 00.000, 00	190	1.200.00 0.000,00	200	1.200 .000. 000,0 0		
Laporan hasil pemeriksaan dan pengawasan koperasi sesuai standar	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	300	200	150.00 0.000,0 0	200	150.000. 000,00	200	150.00 0.000,0 0	400	1.000.00 0.000,00	400	1.000 .000. 000,0 0		
2.17.03.2.01.0004 - Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				150.00 0.000,0 0		150.000. 000,00		150.00 0.000,0 0		1.000.00 0.000,00		1.000 .000. 000,0 0		
Pelaksanaan proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan (Unit Usaha)	300	200	150.00 0.000,0 0	200	150.000. 000,00	200	150.00 0.000,0 0	400	1.000.00 0.000,00	400	1.000 .000. 000,0 0		

2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOOPERASI				865.00 0.000,0 0		1.235.00 0.000,00		1.450.0 00.000, 00		1.565.00 0.000,00		1.880 .000. 000,0 0		
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase KSP/USP yang Sehat dan Cukup Sehat (%)	19,71	25,45	865.00 0.000,0 0	26,1 1	1.235.00 0.000,00	26,67	1.450.0 00.000, 00	27,6 9	1.565.00 0.000,00	27,69	1.880 .000. 000,0 0	2.17.0.00.0 .00.01.000 0 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.04.2.01 - Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				865.00 0.000,0 0		1.235.00 0.000,00		1.450.0 00.000, 00		1.565.00 0.000,00		1.880 .000. 000,0 0		
Dokumen laporan hasil penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	40	65.000. 000,00	40	435.000. 000,00	40	650.00 0.000,0 0	54	765.000. 000,00	54	1.080 .000. 000,0 0		
2.17.04.2.01.0001 - Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota				65.000. 000,00		435.000. 000,00		650.00 0.000,0 0		765.000. 000,00		1.080 .000. 000,0 0		
Terlaksananya Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang Telah Dilakukan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	40	65.000. 000,00	40	435.000. 000,00	40	650.00 0.000,0 0	54	765.000. 000,00	54	1.080 .000. 000,0 0		

Rekapitulasi hasil penilaian kesehatan koperasi per tahun (rating sehat/cukup sehat/tidak sehat)	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	110	800.00 0.000,0 0	110	800.000. 000,00	110	800.00 0.000,0 0	110	800.000. 000,00	110	800.0 00.00 0,00		
2.17.04.2.01.0003 - Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan				800.00 0.000,0 0		800.000. 000,00		800.00 0.000,0 0		800.000. 000,00		800.0 00.00 0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan (Unit Usaha)	40	110	800.00 0.000,0 0	110	800.000. 000,00	110	800.00 0.000,0 0	110	800.000. 000,00	110	800.0 00.00 0,00		
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN				650.00 0.000,0 0		650.000. 000,00		650.00 0.000,0 0		870.000. 000,00		870.0 00.00 0,00		
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan (%)	16,51	32,80	650.00 0.000,0 0	34,33	650.000. 000,00	46,82	650.00 0.000,0 0	48,06	870.000. 000,00	49,31	870.0 00.00 0,00	2.17.0.00.0 .00.01.000 0 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.05.2.01 - Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang				650.00 0.000,0 0		650.000. 000,00		650.00 0.000,0 0		870.000. 000,00		870.0 00.00 0,00		

Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Daftar peserta dan sertifikat pelatihan perkoperasian	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	180	300	650.00 0.000,0 0	300	650.000. 000,00	300	650.00 0.000,0 0	400	870.000. 000,00	400	870.0 00.00 0,00		
2.17.05.2.01.0001 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi				650.00 0.000,0 0		650.000. 000,00		650.00 0.000,0 0		870.000. 000,00		870.0 00.00 0,00		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian (Orang)	180	300	650.00 0.000,0 0	300	650.000. 000,00	300	650.00 0.000,0 0	400	870.000. 000,00	400	870.0 00.00 0,00		
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI				480.00 0.000,0 0		735.000. 000,00		735.00 0.000,0 0		735.000. 000,00		735.0 00.00 0,00		
Meningkatnya kualitas dan produktivitas koperasi	Persentase Koperasi yang Berkualitas (%)	51,82	53,28	480.00 0.000,0 0	54,7 4	735.000. 000,00	56,20	735.00 0.000,0 0	58,3 9	735.000. 000,00	60,58	735.0 00.00 0,00	2.17.0.00.0 .00.01.000 0 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
	Pertumbuhan volume usaha koperasi (%)	108,2 8	2		2,5		3		3		3			
2.17.06.2.01 - Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya				480.00 0.000,0 0		735.000. 000,00		735.00 0.000,0 0		735.000. 000,00		735.0 00.00 0,00		

dalam Daerah Kabupaten/Kota														
Dokumen perjanjian/nota kesepahaman kemitraan koperasi dengan pihak ketiga	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	20	100.00 0.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.06.2.01.0004 - Fasilitas Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				100.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		
Fasilitas kemitraan antar koperasi maupun antara Koperasi dengan badan hukum lainnya termasuk UMKM, bagi Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Kemitraannya (Unit Usaha)	0	20	100.00 0.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Laporan intervensi produktivitas dan penguatan koperasi (akses modal, akses pasar, restrukturisasi manajemen)	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	40	30	130.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		

2.17.06.2.01.0005 - Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha				130.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha (Unit Usaha)	40	30	130.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		
Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi permodalannya dan laporan keuangan	Jumlah Koperasi yang difasilitasi Permodalann		60	100.00 0.000,0 0	60	350.000. 000,00	60	350.00 0.000,0 0	60	350.000. 000,00	60	350.0 00.00 0,00		

	ya (Unit Usaha)													
2.17.06.2.01.0007 - Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				100.00 0.000,0 0		350.000. 000,00		350.00 0.000,0 0		350.000. 000,00		350.0 00.00 0,00		
Fasilitas Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Permodalannya (Unit Usaha)		60	100.00 0.000,0 0	60	350.000. 000,00	60	350.00 0.000,0 0	60	350.000. 000,00	60	350.0 00.00 0,00		
Dokumen laporan koperasi yang difasilitasi penyusunan laporan RAT dan laporan keuangan	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	90	150.00 0.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
2.17.06.2.01.0008 - Fasilitas Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota				150.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		
Fasilitas Pelaporan status kelembagaan dan/atau perkembangan usaha Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Difasilitasi Pelaporannya (Unit Usaha)	0	90	150.00 0.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Database koperasi yang memiliki legalitas keanggotaan sesuai wilayah administrasi	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/ Kota (Unit Usaha)			0,00	130	385.000. 000,00	130	385.00 0.000,0 0	130	385.000. 000,00	130	385.0 00.00 0,00		

2.17.06.2.01.0009 - Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota				0,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		385.000.000,00		
Peningkatan iklim usaha Koperasi melalui aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, dan inovasi teknologi bagi Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota (Unit Usaha)			0,00	130	385.000.000,00	130	385.000.000,00	130	385.000.000,00	130	385.000.000,00		
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)				3.205.000.000,00		2.780.000.000,00		2.780.000.000,00		4.500.000.000,00		5.000.000.000,00		
Meningkatnya ekosistem wirausaha skala mikro	Pertumbuhan Wirausaha (%)	0,99	1,20	2.705.000.000,00	1,35	2.000.000.000,00	1,48	1.500.000.000,00	1,49	3.000.000.000,00	1,62	3.500.000.000,00	2.17.0.00.000.01.0000 - Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah	
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				3.205.000.000,00		2.780.000.000,00		2.780.000.000,00		4.500.000.000,00		5.000.000.000,00		

Laporan kegiatan pembinaan dan pendampingan (jumlah peserta, jenis materi, frekuensi kegiatan)	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	720	0	0,00	180	250.000.000,00	180	250.000.000,00	180	450.000.000,00	180	450.000.000,00		
2.17.07.2.01.0004 - Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro				0,00		250.000.000,00		250.000.000,00		450.000.000,00		450.000.000,00		
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terfasilitasinya Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendamping an Terhadap Usaha Mikro (Unit Usaha)	720	0	0,00	180	250.000.000,00	180	250.000.000,00	180	450.000.000,00	180	450.000.000,00		
Dokumen berita acara, daftar hadir, dan notulen koordinasi dengan pemangku kepentingan pemberdayaan usaha mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa	120	150	250.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		

	n Usaha Mikro (Orang)													
2.17.07.2.01.0005 - Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro				250.00 0.000,0 0		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro (Orang)	120	150	250.00 0.000,0 0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
Database/rekapitulasi unit usaha mikro yang terdaftar dalam basis data daerah	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	121	6.500	1.580.0 00.000, 00	5.50 0	850.000. 000,00	5.500	1.000.0 00.000, 00	6.70 0	1.500.00 0.000,00	6.000	2.000 .000. 000,0 0		
2.17.07.2.01.0014 - Penyusunan Basis Data Usaha Mikro				1.580.0 00.000, 00		850.000. 000,00		1.000.0 00.000, 00		1.500.00 0.000,00		2.000 .000. 000,0 0		
Terfasilitasinya Penyusunan Basis Data Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha Mikro Terdata (Unit Usaha)	121	6.500	1.580.0 00.000, 00	5.50 0	850.000. 000,00	5.500	1.000.0 00.000, 00	6.70 0	1.500.00 0.000,00	6.000	2.000 .000. 000,0 0		
Sertifikat atau daftar peserta pelatihan/kegiatan peningkatan kapasitas SDM UMKM	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	460	875.00 0.000,0 0	500	900.000. 000,00	120	250.00 0.000,0 0	600	1.050.00 0.000,00	600	1.050 .000. 000,0 0		

2.17.07.2.01.0015 - Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan				875.00 0.000,0 0		900.000. 000,00		250.00 0.000,0 0		1.050.00 0.000,00		1.050 .000. 000,0 0		
Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan (Orang)	0	460	875.00 0.000,0 0	500	900.000. 000,00	120	250.00 0.000,0 0	600	1.050.00 0.000,00	600	1.050 .000. 000,0 0		
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari informal ke formal (%)	74,21	75,69	500.00 0.000,0 0	76,5 3	780.000. 000,00	77,38	1.280.0 00.000, 00	78,2 2	1.500.00 0.000,00	79,06	1.500 .000. 000,0 0		
2.17.07.2.01 - Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan				3.205.0 00.000, 00		2.780.00 0.000,00		2.780.0 00.000, 00		4.500.00 0.000,00		5.000 .000. 000,0 0		
Dokumen laporan jumlah unit usaha yang menjalin kemitraan usaha mikro setiap tahun	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	20	30	150.00 0.000,0 0	50	280.000. 000,00	50	280.00 0.000,0 0	100	500.000. 000,00	100	500.0 00.00 0,00		

2.17.07.2.01.0002 - Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro				150.00 0.000,0 0		280.000. 000,00		280.00 0.000,0 0		500.000. 000,00		500.0 00.00 0,00				
Terfasilitasinya Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksana n Kemitraan Usaha Mikro (Unit Usaha)	20	30	150.00 0.000,0 0	50	280.000. 000,00	50	280.00 0.000,0 0	100	500.000. 000,00	100	500.0 00.00 0,00				
Dokumen rekap data usaha mikro yang memperoleh NIB/Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan (Unit Usaha)	720	300	350.00 0.000,0 0	400	500.000. 000,00	700	1.000.0 00.000, 00	700	1.000.00 0.000,00	700	1.000 .000. 000,0 0				
2.17.07.2.01.0003 - Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro				350.00 0.000,0 0		500.000. 000,00		1.000.0 00.000, 00		1.000.00 0.000,00		1.000 .000. 000,0 0				
BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASE LINE TAHU N 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGK AT DAERAH	KETERANG AN		
			2026		2027		2028		2029		2030					
			TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU	TAR GET	PAGU	TARG ET	PAGU				
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)		
Terfasilitasinya Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatka n Perizinan (Unit Usaha)	720	300	350.00 0.000,0 0	400	500.000. 000,00	700	1.000.0 00.000, 00	700	1.000.00 0.000,00	700	1.000 .000. 000,0 0				
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM				8.690.0 00.000, 00		4.575.00 0.000,00		4.575.0 00.000, 00		5.750.00 0.000,00		5.850 .000. 000,0 0				
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan	2,04	5,30	8.690.0 00.000, 00	5,48	4.575.00 0.000,00	6,20	4.575.0 00.000, 00	6,13	5.750.00 0.000,00	6,07	5.850 .000. 000,0 0	2.17.0.00.0 .00.01.000 0 - Dinas Koperasi dan Usaha			

	dan/atau Ekspor (%)												Kecil Menengah	
2.17.08.2.01 - Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil				8.690.0 00.000, 00		4.575.00 0.000,00		4.575.0 00.000, 00		5.750.00 0.000,00		5.850 .000. 000,0 0		
Laporan fasilitasi pengembangan usaha mikro (alat, modal, pemasaran)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		1.650	4.915.0 00.000, 00	850	1.700.00 0.000,00	850	1.700.0 00.000, 00	850	1.700.00 0.000,00	850	1.700 .000. 000,0 0		
2.17.08.2.01.0002 - Pengembangan Usaha Mikro				4.915.0 00.000, 00		1.700.00 0.000,00		1.700.0 00.000, 00		1.700.00 0.000,00		1.700 .000. 000,0 0		
Terfasilitasinya Usaha Mikro Menjadi Usaha Menengah Melalui Pendampingan, Kemitraan, Perluasan Pasar, Akses Pembiayaan dan Investasi, Pengembangan SDM, dan/Kegiatan Lainnya	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		1.650	4.915.0 00.000, 00	850	1.700.00 0.000,00	850	1.700.0 00.000, 00	850	1.700.00 0.000,00	850	1.700 .000. 000,0 0		
Dokumen daftar penerima fasilitasi kewirausahaan per tahun	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		360	725.00 0.000,0 0	360	725.000. 000,00	360	725.00 0.000,0 0	360	1.000.00 0.000,00	360	1.000 .000. 000,0 0		
2.17.08.2.01.0003 - Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan				725.00 0.000,0 0		725.000. 000,00		725.00 0.000,0 0		1.000.00 0.000,00		1.000 .000. 000,0 0		
Terfasilitasinya Wirausaha Pemula Menjadi Wirausaha Mapan	Jumlah yang Difasilitasi (Orang)		360	725.00 0.000,0 0	360	725.000. 000,00	360	725.00 0.000,0 0	360	1.000.00 0.000,00	360	1.000 .000. 000,0 0		

Laporan pelaksanaan inkubasi usaha mikro (jenis usaha, progres, hasil akhir)	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00		
2.17.08.2.01.0005 - Fasilitas Inkubator Usaha Mikro				1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		1.350.000.000,00		
Terfasilitasinya Usaha Mikro dalam Inkubator Wirausaha	Jumlah Usaha Mikro yang Terfasilitasi (Unit Usaha)		10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00	10	1.350.000.000,00		
Laporan fasilitasi per bidang (produksi, pengolahan, pemasaran, SDM, desain, teknologi) beserta data UMKM penerima	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)	898	360	1.700.000.000,00	300	800.000.000,00	300	800.000.000,00	300	1.700.000.000,00	300	1.800.000.000,00		
2.17.08.2.01.0006 - Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi				1.700.000.000,00		800.000.000,00		800.000.000,00		1.700.000.000,00		1.800.000.000,00		
Terfasilitasinya Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia,	898	360	1.700.000.000,00	300	800.000.000,00	300	800.000.000,00	300	1.700.000.000,00	300	1.800.000.000,00		

	Serta Desain dan Teknologi (Unit Usaha)													
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

4.4. Uraian Sub kegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 sebagaimana tertuang dalam RPJMD, Dinas Koperasi dan UMKM menetapkan subkegiatan prioritas yang selaras dengan misi pembangunan daerah, khususnya transformasi ekonomi non-ekstraktif, penguatan kelembagaan ekonomi rakyat, serta peningkatan daya saing UMKM.

Subkegiatan prioritas tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMD, terutama peningkatan pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah, serta mendukung program prioritas kepala daerah, termasuk Program Kredit Kukar Idaman Terbaik. Penetapan subkegiatan dilakukan secara terarah agar memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian outcome pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Program Pengembangan UMKM	Meningkatnya daya saing UMKM		- Sasaran RPJMD: Meningkatkan pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah - Mendukung program prioritas bupati: Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
			Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	
			Pengembangan Usaha Mikro	

No	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KET
1	2	3	4	5
			Penumbuhan dan Pengembangan Kewirausahaan	
			Fasilitasi Inkubator Usaha Mikro	
			Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi	
2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Meningkatnya produktivitas koperasi		- Sasaran RPJMD: Meningkatkan pembangunan ekonomi sektor unggulan daerah - Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.
			Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten	
			Fasilitasi Kemitraan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	
			Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha	
			Fasilitasi Akses Permodalan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	
			Fasilitasi Pelaporan Koperasi yang Keanggotaannya Daerah Kabupaten	
			Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten	

Sumber: hasil analisis, 2025

Program Pengembangan UMKM dan Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi juga merupakan program untuk mendukung

pelaksanaan program prioritas (dedikasi) bupati, yaitu Program Kredit Kukar Idaman Terbaik.

4.5. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 akan diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).

Dengan menggunakan IKU yang jelas dan terukur ini, Dinas Koperasi dan UMKM dapat memantau secara real-time pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Evaluasi secara berkala akan memungkinkan penyesuaian program dan kegiatan agar dapat mencapai hasil yang lebih optimal sesuai dengan visi dan misi pembangunan daerah.

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi dan UKM

Indikator	Baseli ne	Target						D O	Formul asi
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
Kontribusi Koperasi dan UMKM Terhadap PDRB	n/a	0,419 9%	0,574 3%	0,7159 %	0,805 9%	0,921 8%	1,011 8%		Volume usaha koperasi & UMK ÷ PDRB ADHB
Persentase Wirausaha Mapan	n/a	0,209 5%	0,318 6%	0,5354 %%	0,856 4%	0,955 0%	1,264 7%		UM naik kelas ÷ jumlah UM × 100%
Rasio Kewirausahaan	11,84 5%	11,93 7%	12,02 9%	12,121 %	12,21 3%	12,30 5%	12,39 7%		Jumlah wirausaha ÷ angkatan kerja
Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB*	0,303 7	0,303 7%	0,316 4	0,3291	0,341 8	0,354 5	0,367 2		Volume usaha koperasi ÷ PDRB ADHB

Sumber: hasil proyeksi, 2025

Keterangan: * Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB diluar sektor pertambangan dan penggalan

4.6. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Kunci (IKK) adalah indikator kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan

sesuai dengan kewenangan daerah. Lebih lanjut, IKK merupakan ukuran keberhasilan yang dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha kecil menengah.

IKK ini digunakan sebagai penilaian penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sekaligus pencapaian sasaran strategis Renstra. Dengan demikian, pencapaian IKK setiap tahun akan memastikan keterhubungan antara tujuan strategis Dinas Koperasi dan UMKM dengan target yang terdapat dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029.

Penetapan target IKK dilakukan secara bertahap mulai tahun 2025 hingga 2030, dengan tahun 2030 sebagai pijakan dalam penyusunan Renja perangkat daerah pada tahun terakhir. Hal ini bertujuan untuk menjaga kesinambungan perencanaan dan pengendalian kinerja, sehingga pencapaian tujuan pembangunan daerah dapat terus terjaga.

Adapun IKK yang ditetapkan untuk Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara akan disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

NO	INDIKATOR	TARGET TAHUN						KET
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi (%)	2	2	2,5	3	3,5	3,5	
2	Usaha Mikro yang Bertransformasi dari Informal ke Formal (%)	74,8 5	75,6 9	76,5 3	77,3 8	78,2 2	79,0 6	

Sumber: hasil analisis, 2025

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan lima tahunan yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian visi, misi, serta sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD. Dokumen ini disusun dengan memedomani RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 serta memperhatikan *Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria* (NSPK) dan kebijakan nasional. Dengan demikian, dokumen ini menjadi instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan, konsistensi, dan efektivitas pembangunan bidang koperasi dan UMKM yang berorientasi pada peningkatan produktivitas, penguatan kelembagaan, serta pemberdayaan usaha mikro.

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah memiliki peran strategis dalam memperluas akses kelompok rentan termasuk perempuan, penyandang disabilitas, pemuda, dan masyarakat berpenghasilan rendah terhadap pelatihan, permodalan, dan pasar secara setara. Melalui penguatan pendataan pelaku usaha, fasilitasi kemudahan perizinan, serta pengembangan kapasitas SDM melalui pelatihan teknis dan manajerial, dinas berkontribusi memastikan bahwa kelompok rentan tetap menjadi bagian integral dalam proses transformasi ekonomi daerah.

Kaidah Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dalam mengawal operasionalisasi strategi, ditetapkan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- a. *Penyelarasan Tahunan*: Renstra menjadi pedoman wajib dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya, yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-SKPD).

- b. Ketaatan Manajerial: Seluruh aparaturnya di lingkungan Dinas Koperasi dan UKM wajib melaksanakan program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan porsi tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang telah ditetapkan dalam struktur perencanaan tahunan.
- c. Prinsip Efisiensi: Pelaksanaan setiap subkegiatan harus mengedepankan prinsip value for money (ekonomis, efisien, dan efektif) untuk menjamin setiap anggaran yang dikeluarkan berkontribusi langsung pada pencapaian output dan outcome.
- d. Integrasi NSPK: Pelaksanaan program dan kegiatan harus tetap berada dalam koridor kewenangan daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh kementerian terkait.

Pengendalian dan Evaluasi Pengendalian dan evaluasi dilakukan untuk memastikan konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan:

- a. Pengendalian Internal: Dilakukan secara berkala oleh pimpinan dinas untuk memantau kemajuan pelaksanaan subkegiatan serta mengidentifikasi hambatan di lapangan sejak dini agar dapat dilakukan langkah korektif.
- b. Evaluasi Hasil terhadap Renja: Kepala Dinas melakukan evaluasi secara berkala (triwulanan dan tahunan) terhadap hasil Rencana Kerja (Renja) untuk mengukur capaian target output fisik dan keuangan.
- c. Evaluasi Hasil terhadap Renstra: Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 (lima) tahun untuk menilai tingkat pencapaian sasaran strategis (outcome) dan dampak pembangunan bagi masyarakat pelaku usaha.
- d. Mekanisme Perubahan: Jika berdasarkan hasil evaluasi terdapat ketidaksesuaian yang signifikan antara target dan realisasi akibat dinamika lingkungan strategis, maka perubahan Renstra akan dilakukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025–2029 ini disusun sebagai pedoman pembangunan ekonomi kerakyatan. Keberhasilan implementasi Renstra ini menuntut komitmen seluruh jajaran internal, dukungan lintas perangkat daerah, serta sinergi dengan pemerintah pusat dan provinsi. Partisipasi aktif masyarakat serta pelaku usaha akan menjadi faktor penentu tercapainya indikator kinerja utama guna mewujudkan visi Kukar Idaman Terbaik.

Tenggarong: 23 Desember 2025

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kutai Kartanegara

Plt.Kepala Dinas,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and strokes, positioned above the printed name.

H. THAUFIQ ZULFIAN NOOR, S.Pi.,M.A.P

NIP. 19740122 2001121002